



Prof. K.H.R. Mohammad Adnan

PROF. K.H.R MOHAMMAD ADNAN DAN PEMIKIRANNYA DALAM ISLAM

Oleh : Abdul Basit Adnan dan Drs. Abdulhayi Adnan

A. Membina Keluarga

1. Lingkungan Hidupnya

Pada hari Kamis Kliwon, 6 Ramadhan 1818 (tahun Jawa) atau 1306 Hijriyah, bertepatan dengan 16 Mei 1889 Masehi, lahir lah anak laki-laki di sebuah rumah *Pengulon* (tempat kediaman Penghulu), kampung Kauman di tengah-tengah kota Surakarta, Jawa Tengah. Anak laki-laki itu diberi nama Mohammad Adnan alias Shauman.

Orang tuanya bernama *Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Pengulu Tafsiranom V* (kelima), seorang ulama bangsawan, sebagai *abdi dalem* (pegawai) Keraton Kasunanan Surakarta. Walaupun hidupnya berkecukupan, namun *Kiai Kanjeng Pengulu* ini membiasakan hidupnya secara sederhana dan suka *tirakat*. Ia mengikuti jejak moyangnya dulu. *Pengulu Tafsiranom V* adalah keturunan yang secara turun-temurun menjabat *pengulu (qadli)* di Kraton Kasunanan Surakarta, seperti tertera dalam silsilah keluarga yang diuraikan di bawah ini.

Kanjeng *Kiai Pengulu Tafsiranom IV*, yang menjabat *pengulu* semasa Pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwana (PB) VII--IX, adalah kakek *Kiai Pengulu Tafsiranom V* yang dimakamkan di Desa Pajang Saripan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Surakarta. Ia berputra sepuluh orang, yakni :

1. Nyai Ajeng Pujodipuro, berputra 6 orang.
2. Raden Haji Affandi Muqoddas, berputra 6 orang.

3. Raden Nganten Dipopradoto I, berputra 1 orang.
4. Nyai Ajeng Reksoniti, berputra 2 orang.
5. Raden Nganten Jimat Reksodipo, tidak berputra.
6. 6. Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Tafsiranom V, berputra 10 orang (lihat keterangan di bawah).
7. Raden Ngabei Projopangripto, berputra 3 orang.
8. Raden Ngabei Dipopradoto III, berputra 5 orang.
9. Raden Ayu Brotoatmojo alias Abdul Khatam, berputra 1 orang.
10. Raden Nganten Reksoatmojo, berputra 2 orang.

Adapun putra dan putri Kiai K.R.T.P. Tafsiranom V yang berjumlah 10 orang itu sebagai berikut:

1. Raden Ngabei Dirjodipuro alias Muhammad Qomar, berputra 4 orang.
2. Raden Ngabei Tondhodipuro (Raden Ketib Cendhono), alias Muhammad Ridwan, berputra 4 orang.
3. Raden Nganten Mursoko alis Mardiyah, berputra 2 orang.
4. Kiai Haji Raden Mohammad Adnan, alias Shauman, berputra 8 orang.
5. Kiai Kanjeng Raden Tumenggung Pengulu Tafsiranom VI, sebelumnya bergelar Raden Ketib Winong, dan nama kecilnya Sahlan, berputra 7 orang.
6. Raden Ngabei Darmosuroto alias Muhammad Thohar, nama kecilnya Muhammad 'Ishom, berputra 4 orang.
7. Raden Nganten Maknawi, tidak berputra.
8. Raden Nganten Sumodiharjo, alias Siti Maryam, berputra 1 orang.
9. Raden Nganten Projowiyoto alias Marfu'ah, berputra 6 orang.
10. Raden Nganten Condrodiprojo alias Marhamah, berputra 3 orang.

Dengan menilik riwayat hidup Kiai Pengulu Tafsiranom V di atas, Kiai Haji Raden Mohammad Adnan ternyata merupakan putra ke-4. Muhammad Qomar, kemudian bergelar Tafsiranom V, dilahirkan pada hari Rabu, 17 Rabiul Awal tahun Jimakir 1786

Jawa (1854 M). Ia memangku jabatan pengulu (*qadli*) ketika Sri Susuhunan Paku Buwono IX (1861-1893) dan X (1893-1936) berkuasa. Kiai Pengulu juga menjabat Komisaris Madrasah Manba'ul 'Ulum, sebuah madrasah tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah, yang mendidik calon naib, pengulu, di lingkungan Kasunanan. Kiai Pengulu wafat pada tanggal 21 September 1933 pukul 02.00, dalam usia 79 tahun (*Hudaya*, 6 Oktober 1933).

Dengan seizin Sri Susuhunan Paku Buwono X, jenazahnya dimakamkan di astana (pemakaman) Imogiri, di sebuah bukit di perbatasan selatan Surakarta dan Yogyakarta. Astana Imogiri merupakan kompleks makam keluarga raja dinasti Mataram (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta). Ahli waris dan keluarga almarhum Tafsiranom V sebenarnya lebih senang jika almarhum dimakamkan saja di Makam Pajang Surakarta, yang dengan demikian akan memudahkan ahli waris dan keluarga untuk pergi berziarah ke makamnya. Namun setelah melewati berbagai pertimbangan, diterima juga pemberian kehormatan itu. Kehormatan yang diberikan itu mengingat jasanya dalam Pemerintahan Kasunanan dan pribadinya yang luhur. Kiai Kanjeng Pengulu berdinast di kraton selama 49 tahun.

Diceritakan bahwa almarhum Kiai Pengulu Tafsiranom V selama hidupnya hampir setiap malam tidak pernah tertinggal melakukan *shalatul lail* (*shalat tahajjud*, shalat malam). selalu berpusa sunat Senin dan Kamis. Shalat fardlu lima waktu dilakukannya dengan berjama'ah di Masjid Agung, selalu imamnya. Pada bulan Ramadhan tekun *beritikaf* (merenung dengan khusus), sambil berzikir membaca *kalimah thayyibah* di dalam masjid, tengah malam. Dalam pergaulan di tengah masyarakat di kenal ramah, suka menengok tetangga yang sedang sakit, dan berta'ziah bila ada orang yang meninggal. Cara hidupnya yang sederhana dapat dilihat dari cara tidurnya yang tidak beralaskan kasur dan bantal, melainkan langsung berbaring di atas bale-bale (dipan sederhana) yang beralaskan tikar. Jika dikatakan berbantal, bantal-

nya adalah sepotong kayu yang cekung yang dialasi sorban. Itulah yang disebut "dumpal". Jika berbuka puasa, hanya berbuka dengan makanan kecil dan secangkir teh manis, tanpa makan nasi. Tidurnya rata-rata empat jam setiap malam, bahkan setiap malam Jum'at Kiai Pengulu tidak tidur sama sekali. Walaupun demikian, pekerjaannya sehari-hari selaku Pengulu Kraton dan Pengulu Landraad (Pengadilan Negeri) tidak terganggu. (*Kumandang Rakyat* 11-1-1935). Pengganti Pengulu Tafsiranom V bukan kakak Mohammad Adnan yang sulung, melainkan adik kandung, atau saudara nomor kelima, yang bernama Sahlan, yang sebelum menjabat Pengulu bergelar Raden Ketib Winong. Sedangkan Mohammad Adnan, setelah ayahandanya meninggal, menggantikan jabatan Pengulu Landraad.

Mohammad Adnan dilahirkan dan dibesarkan di Kampung Kauman dan tinggal di rumah tradisional Jawa yang berbentuk joglo serta berpendhapa besar. Pada masa kecil dan remajanya suasana hidup yang meliputinya masih dipengaruhi oleh feodalisme; tradisi Kasunanan Surakarta sangat nampak sifat kefeodalannya. Hal ini dapat dicontohkan pada penampilan ayahanda Mohammad Adnan, yakni Tafsiranom V, sering memakai jubah dan bersorban sebagaimana umumnya busana ulama pada masa itu. Namun sebagai pejabat kraton, Kiai Kanjeng Pengulu ini ber-kain batik, berjas beskap hitam berenda-renda dan di punggungnya diselipkan keris sebagai kelengkapan busana tradisional Jawa. Tutup kepalanya bercorak khusus, kombinasi model *udheng* Jawa dan sorban yang warnanya putih. Pakaian model terakhir ini dipakai dalam tugas dinas ke Kantor Yogaswara (Departemen Urusan Agama Kraton), atau waktu menghadap Sri Susuhunan. Bila mengadakan *pisowanan* (menghadap Sri Susuhunan) ke kraton, beliau diringi oleh para pembantunya yang membawa payung kebesaran yang berwarna hijau kuning keemasan. Orang-orang yang berjumpa dengan iring-iringan *pisowanan* itu biasanya lalu berjongkok, kadang-kadang disertai sembah (hormat) dengan tangan yang dirapatkan ke hidung.

Rumah *Pengulon*, tempat tinggal Mohammad Adnan bersama orang tuanya, bukan hanya untuk tempat tinggal pengulu, melainkan dipakai juga semacam "kantor" yang mengurus NTR (Nikah, Talaq dan Ruju') dan masalah keagamaan Islam, terutama yang menyangkut keluarga Kasunanan. Rumah *Pengulon* berada di Kampung Kauman di sebelah utara Masjid Agung. Letak yang demikian itu sesuai dengan tradisi tata kota di Jawa pada umumnya dan tata kota di ibu kota kerajaan Surakarta-Yogyakarta pada khususnya, yakni istana (kraton), raja (bupati) di sebelah selatan, dengan alun-alun di mukanya dan masjid di sebelah baratnya. Di sekitar masjid (*kauman*) tinggalah para agamawan (pemimpin, kiai dan para santrinya). Kebijakan meletakkan tempat ulama dan para santrinya dekat masjid dan kraton adalah usaha untuk menjalin hubungan yang dekat antara raja (pemimpin pemerintahan atau *umara'*) dengan '*ulama'* (pemimpin agama). Rumah-rumah paman Mohammad Adnan berada di sekeliling rumah induk *Pengulon*.

2. Memasuki Pendidikan

Mohammad Adnan mengenal huruf-huruf Al-Qur'an (huruf Arab) pertamakali melalui ayahandanya sendiri. Waktu itu belum banyak sekolah yang didirikan. Apalagi sekolah yang memberi pelajaran baca tulis huruf Al-Quran. Sedangkan Sekolah Rakyat baik yang dinamakan *Volkschool* maupun *HIS (Hollands Inlandse School)* bisa dihitungkan dengan jari. Pengetahuan baca huruf latin dan pengetahuan umum lainnya mula-mula diperoleh dengan belajar secara pribadi dengan mengundang guru di rumahnya. Tetapi kemudian Adnan berkesempatan juga memperoleh pendidikan formal di Sekolah Rakyat, dan sesudah berdiri Madrasah Manba'ul 'Ulum, dia pun belajar di sana sampai selesai.

Pada tahun 1910 ayahandanya mendirikan badan penerbitan dan perpustakaan agama Islam yang diberi nama *Mardikintaka*. Penerbit *Mardikintaka* menerbitkan kitab-kitab agama Islam, ber-

huruf Jawa dan berhuruf Arab-Jawa yang disebut *pegon*, yang berbahasa Jawa pula. Kemudian Mardikintaka menerbitkan pula majalah keagamaan yang bernama *Hudaya*. Majalah itu memuat ceramah-ceramah yang diberikan para mubalig Islam tentang berbagai masalah agama Islam, juga karangan langsung yang bukan berasal dari ceramah atau pidato.

Pengajian sistem pesantren dimulai di musholla *Pengulon*. Dalam perkembangan lebih lanjut diusulkan agar pengajian ditingkatkan kualitasnya dengan mengubah sistem individual/kelompok menjadi sistem klasikal (dengan tingkat/kelas). Dengan kata lain, pengajian itu diubah menjadi pendidikan formal yang disebut madrasah atau sekolah, yang diatur (diorganisasikan) secara tertib dengan mencantumkan kurikulum tertentu yang berisi bermacam-macam mata pelajaran. Usul tersebut diteruskan oleh Tafsiranom kepada Papatih Dalem Kasunanan yang pada masa itu dijabat oleh Kangjeng Ario Sosrodiningrat IV (Rijkstuurder van de Surakarta Hadiningrat) dan dari sana diteruskan kepada Sri Susuhunan, penguasa tertinggi di Surakarta Hadiningrat.

Setelah usul membangun madrasah diterima, pada tanggal 23 Juli 1905 diletakkan batu pertama pembangunan gedung madrasah yang diberi nama *Manba'ul 'Ulum*, artinya tenaga alim ulama, khatib, naib, perdikan, yang menguasai ilmu agama Islam (*Damai*, 21 Juli 1935, nomor 7/II).

Madrasah Manba'ul 'Ulum mempunyai 11 jenjang (kelas), terbagi atas tingkat dasar (ibtidaiyah), 6 tingkat, tingkat menengah (tsanawiyah) 3 tingkat, dan tingkat atas (aliyah) 2 tingkat. Semua terletak di bawah satu atap (gedung). Pada 20 Februari 1915 Madrasah Manba'ul 'Ulum diresmikan Pemerintah Kasunanan.

Ketika didirikan Madrasah Manba'ul 'Ulum mempunyai susunan pengurus sebagai berikut: 1. Papatih Dalem sebagai Mufattis Akbar; 2. Pengulu Tafsiranom, Mufattis Kabir; 3. Reksodiprojo, Katibul Mufattis.

Para ustadz yang menjadi pendorong Madrasah Manba'ul 'Ulum dan kemudian juga menjadi pendidik serta pengajar di sana adalah Kiai Ketib Arum, Kiai Fadlil, Kiai Bagus Abdul Khatam, Kiai M. Nawawi, Kiai Bagus 'Arafah, Kiai Muhammad Idris, Kiai Fakhurrazi, Kiai Ilyas dan masih ada beberapa kiai yang lain. Mata pelajaran agama yang diberikan di madrasah itu adalah Ilmu Fiqih, Tafsir Al-Qur'an, al-Hadits, Ilmu al-Kalam (Ushuluddin), Ilmu Nahwu wash Sharaf (Tata Bahasa Arab) dan Ilmu Falaq (Astronomi).

Selain di Madrasah Manba'ul 'Ulum, Adnan juga belajar dan memperdalam ilmu agama Islam di berbagai pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Antara lain, ia belajar di Pondok Mangunsari berguru kepada Kiai Imam Bukhari, di Pondok Mojosari berguru kepada Kiai Zainuddin, lalu kembali ke Surakarta berguru kepada Kiai Idris di Pondok Jamsaren. Pondok Jamsaren ketika itu merupakan pesantren yang besar dan terkenal, dengan kiaiinya yang masyhur, dan yang juga mendapat simpati dari Sri Susuhunan.

Dalam percakapan almarhum Mohammad Adnan dengan penulis di rumah Jalan Suroto 18 Yogyakarta pada 4 Mei 1964, almarhum mengutarakan pengalamannya di Pondok Pesantren Jamsaren sebagai berikut. Di Pondok Jamsaren Mohammad Adnan mempelajari sampai hafal kitab nahwu *Alfiyah*, karya Ibnu Malik. *Alfiyah* adalah kitab gramatika bahasa Arab yang ditulis dalam bentuk puisi yang terdiri dari 1.000 bait. Lebih lanjut diutarakan keadaan kamar pondok itu. Dinding penyekat kamar dari pondok bukan dari batu merah, melainkan dari *gedhek* (bambu yang dianyam). Jadi, kalau ada anak yang menghafal dengan suara nyaring, maka di kamar sebelahnya akan mendengarnya dengan jelas. Untuk alat penerangan belum digunakan listrik, melainkan lampu teplok, yakni lampu minyak tanah yang bisa digantungkan di dinding atau diletakkan di meja. Para santri

hidupnya sangat sederhana. Tidurnya tidak ada yang berkasur. Setiap Senin dan Kamis mereka berpuasa sunat.

Pada tahun 1908 ayahanda, Pengulu Tafsiranom V, berkeinginan agar di antara putra-putranya ada yang memperdalam ilmu agama Islam di tanah suci Makkah Al Mukarramah. Pilihan ayahanda jatuh pada ketiga putranya, yakni: Mohammad Adnan alias Shauman, Sahlan, dan Ishom alias Muhammad Thohar. Maka berangkatlah ketiga putranya itu ke Makkah Al-Mukarramah untuk mengaji, meningkatkan ilmu agama Islam.

Di Makkah Mohammad Adnan bersama kedua saudaranya belajar di Madrasah Darul 'Ulum dan berguru kepada Kiai Mahfudl, Kiai Idris, Syaikh Ahmad Al-Minangkabawi (berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat), dan Syaikh Syatho. Biaya belajar ditanggung orang tuanya sendiri, Pengulu Tafsiranom V. Selama delapan tahun di Makkah, Adnan bersaudara mengaji dengan tekun dan hidup sederhana sebagai layaknya para santri. Di tengah-tengah masa studi di Makkah itu ayahanda memerintahkan agar salah satu di antara ketiga bersaudara mau belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Atas persetujuan bersama, yang berangkat ke Al-Azhar, Mesir adalah saudara mudanya, Muhammad 'Ishom.

Kemudian menjelang tahun 1914 karena suasana dunia internasional genting, yaitu setelah peristiwa terbunuhnya orang penting di Sarajevo yang telah menjadi sebab timbulnya kasus Perang Dunia Pertama, ayahanda memerintahkan agar putra-putranya kembali ke tanah air. Barangkali ada kekhawatiran, jika nanti timbul peperangan besar, maka hubungan antara Jazirah Arab dan Indonesia menjadi terputus dan dapat menyebabkan para mukimin Indonesia di Makkah terlantar hidupnya. Oleh karena itu Mohammad Adnan bersaudara memutuskan untuk memenuhi perintah ayahanda pulang ke tanah air. Dengan menumpang kapal laut mereka kembali ke tanah air dan pada tahun 1916 tiba dengan selamat. Masyarakat muslimin di Surakarta sa-

ngat berharap agar Adnan dapat mengamalkan dan meneruskan ilmu yang sudah dipelajarinya itu kepada masyarakat.

3. Membina Rumah Tangga

Ketika belajar di Makkah, Mohammad Adnan berkenalan dengan Kiai Haji Akram, seorang saudagar yang berasal dari Laweyan, Surakarta. Haji Akram ini akhirnya menjadi kakak mertua Mohammad Adnan. Haji Akram memilih cucunya untuk dijodohkan dengan Mohammad Adnan. Cucunya itu ialah Siti Maimunah binti Haji Shofawi, putri kedua H. Shofawi, yang dilahirkan di Surakarta tahun 1907. Akhirnya dengan persetujuan kedua keluarga Tafsiranom V, dilangsungkan pernikahan antara Mohammad Adnan dan Siti Maimunah. Keduanya merupakan pasangan suami isteri yang *kufu* dan serasi. Mohammad Adnan *alim* dalam ilmu agama, sedangkan Maimunah keturunan saudagar muslim, dan terdidik taat beragama. Keduanya saling membantu dan melengkapi.

Dari perkawinan itu Allah berkenan menganugerahkan amarah (titipan) 15 orang anak, laki-laki dan perempuan. Anak pertama sampai yang keenam atas kehendak Allah tidak diberi umur panjang. Anak-anak itu meninggal pada usia antara 1 sampai 2 tahun. Mohammad Adnan pada tanggal 21 April 1930 dianugerahi anak laki-laki yang ke-7 dan diberi nama dengan salah satu nama dari Asmaul Husna, yakni "Abdulhayi (Hamba Allah yang bersifat hidup). Berturut-turut lahirlah putra-putranya yang lain: 'Abdullah (1931), Abdul Basit (1933), Muyassaroh (1935), Muhtaromah (1936), 'Abdul Hakim (1937), 'Abdul Nur (1938), 'Abdul Hadi (1940). dan yang bungsu 'Abdul Latif (1943).

Sesudah pernikahannya dengan Siti Maimunah, Mohammad Adnan tinggal di rumah yang terpisah dari rumah induk yang didiami Haji Shofawi. Rumah itu terletak di Kampung Tegalsari, di Jalan Bumi. Di sebelah rumah Jalan Bumi 9 itu berdiri sebuah masjid yang didirikan atas usaha Haji Shofawi dan Mohammad

Adnan, serta dibantu oleh masyarakat muslim Tegalsari. Pembangunan masjid ini bersamaan dengan pembangunan Madrasah Ta'mirul Islam (28 Oktober 1928). Kalau ke kantor, Mohammad Adnan, selaku Hoofd Pengulu Landraad Surakarta yang terletak di sebelah utara Kebun Raja "Sriwedari", biasanya naik *andhong* (kereta kuda yang beroda empat).

Maimunah, istrinya disamping sebagai ibu rumah tangga juga menjadi pengusaha batik dan tenun.

Ketika usaha tenunnya berkembang, Mohammad Adnan bersama istrinya pindah ke rumahnya sendiri, Jalan Bumi 1, sebelah selatan madrasah, tidak jauh dari rumah mertuanya. Pada 1940 ketika Mohammad Isa, Ketua Hoofd voor Islamitische Zaken, meninggal dunia, Gubernur menunjuk Mohammad Adnan sebagai gantinya. Berhubung dengan jabatan baru itu, ditinggalkannya jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad Surakarta. Pada bulan Desember 1941 berangkatlah Mohammad Adnan bersama keluarganya ke Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Betawi.

Ketika tinggal di Jalan Kramat Raya, istri Mohammad Adnan mengandung putranya yang bungsu. Pada tanggal 6 Muharram 1363 Hijri atau bertepatan dengan 13 Januari 1943, Maimunah melahirkan putranya yang ke-9 (bungsu), diberi nama Abdul Latif. Abdul Latif lahir dalam keadaan selamat dan sehat wal afiat, akan tetapi ibunya mengalami pendarahan terlalu banyak yang akhirnya jiwanya tak tertolong lagi.

Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 1943 jenazah almarhumah dimakamkan di Pemakaman Umum "Kawi-Kawi" di kawasan Gang Sentiong, Jakarta. Tampak hadir melayat pada waktu itu, Kolonel Hori, perwira tentara Jepang yang menjabat Kepala Kantor *Syumubu* (Urusan Agama), Mr. Mulyatno, Mr. Notosusanto, keduanya bekas Panitera Mahkamah Islam Tinggi, Habib Ali Alhabsyi, para ulama Jakarta dan masyarakat sekitarnya.

Setelah tenggang waktu satu tahun dari wafatnya almarhumah Maimunah, Ibu Nyai Pengulu Tafsiranom V menganjurkan kepada putranya Adnan, agar menikah lagi dengan Nyonya Salamah, seorang janda yang dahulu menjadi istri almarhum adiknya, Muhammad Ishom yang meninggal pada tahun 1941. Mohammad Adnan (57 tahun) menerima anjuran ibundanya, dan melangsungkan pernikahannya dengan Salamah binti Masyhuri, yang dilahirkan pada 10 Agustus 1911. Pernikahan berlangsung pada bulan Desember 1943.

Pada hari Jum'at, bulan Ramadhan 1366 H. bertepatan tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini disambut dengan gembira oleh seluruh rakyat Indonesia, juga oleh keluarga Adnan. Sejak proklamasi itu rumah dan kantor Mahkamah Islam Tinggi tempat Mohammad Adnan bekerja tiada lagi dikibarkan bendera "*Hinomaru*". Sebagai gantinya, Sang Merah Putih dikibarkan di rumahnya di Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia.

Keadaan di Jakarta setelah proklamasi semuanya dalam ke-sibukan. Pemuda-pemuda bekas Seinendan, Keibodan, Barisan Pelopor, bekas Peta (Pembela Tanah Air), Heiho dan Hizbullah, hilir mudik menjaga keamanan dan mengamankan gedung-gedung yang sudah dikuasai Republik Indonesia. Sementara itu tentara Jepang masih berkuasa dan berpatroli di mana-mana, yang kadang-kadang menimbulkan insiden dengan pemuda-pemuda Indonesia. Penulis masih ingat, dan turut menyaksikan rapat raksasa yang diadakan pada bulan September 1945 untuk menyambut proklamasi yang baru didengungkan. Bung Karno hanya mengucapkan pidato selama tidak lebih dari sepuluh menit, kemudian memerintahkan massa yang emosinya meluap-luap itu untuk pulang demi keamanan. Rapat itu dikelilingi oleh tentara Jepang yang bersenjata lengkap dan siap tempur dengan panser. Tetapi, massa taat perintah pemimpinnya dan pulang dengan teratur.

Kedatangan tentara Inggris sebagai wakil Sekutu untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Sekutu tidak menjadikan kota Jakarta menjadi lebih aman. Ketegangan-ketegangan makin menjadi-jadi karena disamping tentara Inggris, ada tentara Belanda yang menyelundup di belakangnya. Pertempuran terjadi dimana-mana antara tentara Belanda/Sekutu dengan pemuda-pemuda Indonesia sehingga situasi kota tidak aman. Berhubung dengan itu, Mohammad Adnan memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke kota Surakarta.

Pada bulan Oktober 1945 berangkatlah Mohammad Adnan beserta seluruh keluarganya dengan kereta api dari stasiun Jatinegara menuju Surakarta. Dari rumah ke stasiun berkendara truk PMI (Palang Merah Indonesia) karena Mohammad Adnan menjadi penasehat PMI Pusat Jakarta. Jalan-jalan nampak sepi, dan tembakan-tembakan terdengar di sana-sini. Namun demikian, *alhamdulillah* perjalanan tiada mengalami hambatan, dan rombongan keluarga Adnan selamat tiba di stasiun Jatinegara.

Kereta api yang ditumpangi keluarga Adnan, yang sarat oleh penumpang berangkat dari stasiun Jatinegara senja hari, dan tiba di stasiun Balapan Surakarta keesokan harinya kira-kira pukul 08.00 pagi. Rumah yang dituju ialah "*Dalem Pengulon*", di Kauman tempat Adnan dulu pernah hidup bersama orang tuanya. Saat itu "*Dalem Pengulon*" dalam keadaan kosong setelah Ibunda Nyai Pengulu Tafsiranom meninggal awal tahun 1945.

Pada awal tahun 1946 Mohammad Adnan kembali lagi ke Jakarta untuk membenahi kepindahan kantor Mahkamah Islam Tinggi dari Jakarta ke Surakarta. Banyak kantor, jawatan, departemen-departemen yang sudah hijrah ke daerah-daerah yang aman, terutama ke Yogyakarta dan Surakarta. Pemindahan ini mengikuti kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia yang menghijrahkan Pusat dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian Yogyakarta menjadi ibukota revolusi. Dalam menghijrahkan MIT (Mahkamah

Islam Tinggi) Mohammad Adnan dibantu oleh paniteranya, Muhammad Junaidi dan beberapa karyawan.

4. Pendidikan Anak-Anak

Mohammad Adnan memberikan pendidikan agama kepada anaknya ada yang dilakukannya secara langsung dan ada pula yang dilaksanakan secara tidak langsung. Mulai usia 4 tahun, semua putranya diberi pelajaran menghafal Al-Fatihah *ayat demi ayat*, diteruskan dengan *surat-surat* dari juz 'Ammah yang pendek-pendek. Tuntunan menghafalkan firman Allah yang berupa *surat-surat* yang pendek itu diberikan langsung oleh Mohammad Adnan. Sesudah itu, ibu anak-anak melatih lagi hafalan-hafalan *surat-surat* pendek seperti Surat al-Ikhlâs, al-Falaq, an-Nas, dan lain-lainnya. Makin meningkat umur anak itu, makin bertambah jumlah hafalannya.

Ketika anak-anak mencapai umur 5-6 tahun mulailah diberi pelajaran shalat, sambil meneruskan hafalan surat-surat dari Juz 'Ammah. Pelajaran shalat diberikan oleh ibu anak-anak, Nyonya Maimunah, sedangkan Mohammad Adnan memeriksa kembali hasil belajar.

Sesekali dimintakan salah seorang anaknya untuk membaca atau melafalkan bacaan *rukuk*, *i'tidal*, *sujud*, duduk antara dua sujud, dan *at-tahiyat*. Kalau masih ada kesalahannya diperbaiki, kalau sudah betul dimantapkannya. Dalam usia itu anak-anak juga mendapat pelajaran membaca huruf al-Qur'an, huruf Arab, dari ibu bapaknya.

Ketika di Jakarta, Mohammad Adnan memerintahkan kepada istrinya agar anak-anak ditingkatkan pendidikan agamanya, bukan hanya agar dapat membaca Al-Qur'an saja, melainkan perlu juga diberi pelajaran pokok-pokok ajaran Islam tentang Rukun Iman, Rukun Islam, tuntunan Ibadah dan Akhlaq. Untuk melaksanakan maksud ini, anak-anak yang sudah agak besar (8 sampai 11 tahun) setiap sore sehabis sholat Ashar diberikan pendidikan

dan pengajaran agama yang meliputi bidang Tauhid, Fiqih, dan Akhlaqul Karimah. Buku rujukan (*reference*) yang digunakan Ibu adalah *Aqidatul Awwam* untuk Tauhid, *Safinatun Najat* untuk Fiqih dan *Hidayatul Islam* karangan Mohammad Adnan sendiri untuk Akhlaq. Pelajaran yang bersumber dari kedua kitab yang pertama disederhanakan oleh Ibu, dan diuraikan tanpa teks. Untuk bagian-bagian yang penting (pokok) anak-anak disuruh menghafalkan, misalnya: Rukun Iman, Rukun Islam, Rukun Agama, Sifat Dua Puluh (Sifat Wajib Allah), sedangkan pelajaran yang bersumber dari kitab *Hidayatul Islam* diberikan dengan membaca dan menuliskan buku itu, yang kemudian anak-anak dilatih membaca. Kitab itu berbahasa Jawa berhuruf *Arab pegon*, yang banyak juga disertai sumber-sumber Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sejak itu anak-anak kenal dan hafal betul ayat-ayat yang penting. Sebagian besar anak-anak Mohammad Adnan mendapat kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Ada yang pernah kuliah di PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) meskipun tidak selesai. Ada pula yang belajar di Fakultas Hukum, Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada dan ada pula yang belajar di IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Empat di antaranya dapat menyelesaikan studinya sampai memperoleh gelar sarjana.

Dalam kebijaksanaan pendidikannya, Mohammad Adnan tidak pernah mengharuskan putra-putranya memilih bidang studi tertentu. Meskipun Mohammad Adnan tergolong ulama, ia tidak pernah memberi tekanan kepada anak-anaknya, misalkan dengan mengatakan: "*Nak, kau harus belajar di Madrasah Diniyah, dan meneruskan ke Perguruan Tinggi Agama Islam karena sebagai anakku kau seharusnya menguasai 'ulumud diniyah,*" atau mengatakan, "*Kau harus melanjutkan ke jurusan eksakta karena jurusan ini lebih banyak memberi jalan yang mudah dalam melanjutkan karyamu.*" Tidak! Dia tidak pernah berpendapat demikian. Kalau dia mempunyai pendapat tentang arah studi yang perlu ditempuh anak-

nya, secara persuasif ia hanya menganjurkan dan bukan mewajibkan.

B. Jejak Awal Pada Masa Penjajahan Belanda

1. Awal Karier sebagai Pendidik

Sejak pulang dari studi ilmu keagamaan Islam di Makkah, Adnan bercita-cita menyebarluaskan Ilmu Agama Islam yang diajarkannya. Sebenarnya ia ingin sekali mendirikan dan mengelola pesantren sendiri. Akan tetapi karena ada tugas lain yang tidak kalah pentingnya dengan mendirikan dan mengelola pesantren, maka cita-cita utamanya belum dapat dilaksanakannya. Meskipun demikian, ia tetap ingin menyebarluaskan ilmu agama Islam, walaupun dengan cara lain. Bidang yang dianggap tepat untuk menampung cita-citanya itu ialah bidang keguruan dan pendidikan. Ia sebenarnya kurang suka menjadi *abdi dalem* (pegawai kraton), priyayi atau pegawai negeri. Berpangkal wasiat ayahandanya, telah mengantarkan Mohammad Adnan pada suratan takdir bahwa sampai akhir hayatnya ia harus membaktikan dirinya kepada Allah, bangsa dan negara melalui pegawai negeri.

Karena orang-orang tahu bahwa Mohammad Adnan alim dalam ilmu agama Islam, apalagi memang berkeinginan untuk menyebarluaskannya, maka berdatanganlah di rumahnya orang-orang dari berbagai kalangan untuk berguru dan mempelajari agama Islam. Ada di antara mereka itu kalangan anak muda, orang tua, dan wanita. Ada pula orang-orang yang berlatar belakang Islam awam, orang-orang sederhana dan ada yang tergolong intelek. Diantara kalangan yang tergolong intelek terdapat guru-guru sekolah umum, misalnya Soemadi dan Koesban, keduanya guru HIS. Mereka mengaji di luar jam kerja, yakni dari Ashar sampai Maghrib.

Melihat kegiatan pengajian yang padat itu, ayahandanya memerintahkan anak-anaknya untuk mendirikan sekolah. Itu dipenuhi

dengan mendirikan Sekolah Bawaleksana (khusus putri), Madrasah Tarbiyatul Aitam (Pendidikan anak-anak Yatim) dan Madrasah Syari'ah (Pendidikan Agama Islam, khusus laki-laki). Ketiga jenis sekolah itu semuanya memberikan pendidikan agama Islam. Sedangkan sekolah Bawaleksana yang hanya khusus putri itu memberikan pendidikan umum dan agama. Tarbiyatul Aitam yang berarti 'Pendidikan Anak-Anak Yatim' yang semula dimaksudkan khusus untuk anak yang benar-benar yatim menurut arti harfiahnya, kemudian juga diperluas untuk anak-anak lain, dengan pengertian bahwa yatim yang dimaksud juga bermakna yatim ilmu. Gedung madrasah itu didirikan di atas tanah kraton yang digaduhkan (hak pakai) kepada orang yang menjabat penghulu atau qadli Kraton Surakarta. Gedung itu sampai sekarang masih berdiri tegak, sebagian dipakai untuk Sekolah Taman Kanak-Kanak dan yang lain untuk keperluan serba guna dan musholla putri.

Selain mengajar di madrasahnyanya sendiri, Mohammad Adnan mengajar pula di Madrasah Khairiyah Pasar Kliwon Surakarta, sebuah madrasah siswa-siswanya kebanyakan keturunan Arab. Banyak diantara orang-orang Sala menyebut atau memanggil Mohammad Adnan ini dengan sebutan "Den Kaji" saja. Ini merupakan sebutan kombinasi gelar kebangsawanan dan keagamaan. Dan sebutan "Den Kaji" masa itu tidak ada duanya. Kalau orang menyebut "Den Kaji" tidak lain yang dimaksud ialah Raden Haji Mohammad Adnan bin Tafsiranom V. Sebagai guru madrasah, dia disebut "Ustadz Adnan". Sebagai orang tua, sesepuh tempat orang bertanya berbagi macam persoalan dan sebagai salah seorang ulama, banyak juga orang memberi gelar "Kiai Adnan".

2. Tugas di Lingkungan Kehakiman

Sejak masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintahan Jepang sampai masa Pemerintahan Republik Indonesia, Mohammad Adnan mempunyai tugas sebagai hakim agama dalam lingkungan peradilan agama (Islam).

Bermula ia menjadi anggota luar biasa Pengadilan Agama di Surakarta berdasarkan *Besluit Gouverneur Generaal Hindia Belanda* yang berkedudukan di Bogor, No. 52 Tanggal 26-12-1919. Kemudian dengan *Besluit* Residen Surakarta, No. 190 tanggal 9-10-1921, diangkat menjadi *Adjunct Pengulu Landraad* (Pengadilan Negeri) Surakarta.

Tugas Pengulu Landraad antara lain melakukan pengambilan sumber terhadap terdakwa atau saksi yang diajukan ke Pengadilan Negeri (Landraad). Di samping itu juga dimintai nasihat tentang perkara yang ada hubungannya dengan hukum Islam, misalnya yang menyangkut perkara warisan.

Untuk memperjuangkan hak-hak Pengadilan Agama, Mohammad Adnan mendirikan organisasi kepenguluhan yang diberi nama *Perhimpunan Pengulu dan Pegawainya*, disingkat PPDP yang ruang lingkupnya meliputi wilayah Jawa dan Madura. Pada masa itu Pengadilan Agama hanya terdapat di Jawa dan Madura. Ada juga semacam Pengadilan Agama di Jawa yang terdapat di luar pulau Jawa, tetapi pengadilan semacam itu tunduk pada peraturan lain.

Mohammad Adnan memandang perlu mendirikan PPDP pada tahun 1937 karena dengan sarana organisasi kepenguluhan yang bernama PPDP itu, pengetahuan dan kualitas profesi pejabat keagamaan dapat ditingkatkan dan nasib anggotanya (kaum, naib, pengulu dan sebagainya) dapat diperbaiki.

Pada masa itu Pengadilan Agama sangat terbatas wewenangnya dalam mengadili suatu perkara. Pengadilan Agama hanya berhak mengadili perkara Nikah, Talak, Rujuk (NTR). PPDP memperjuangkan hak Peradilan Agama agar diberi wewenang yang lebih luas, yakni tidak hanya terbatas mengadili perkara NTR, melainkan mencakup juga perkara warisan yang menjadi urusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian diharapkan agar dasar hukum yang dipakai untuk memutuskan perkara warisan terhadap orang Islam bukan hukum adat, melainkan hukum Islam. Pernah Mohammad Adnan bercerita tentang percakapannya dengan Dr. F.

Pijper, pejabat *Adviseur voor Inlandse Zaken* (Penasehat Urusan Bumiputra) yang membahas beberapa masalah peradilan agama. Ia ditanya mengapa berkeberatan perkara warisan di pengadilan diputuskan menurut hukum adat? Adnan menjawab bahwa pernah terjadi Pengadilan Negeri mengadili perkara warisan orang yang beragama Islam di Solo berdasarkan hukum adat Blambangan yang sudah tidak berlaku lagi.

Setelah Kiai Muhammad Isa, Ketua Mahkamah Islam Tinggi pertama, meninggal dunia, Mohammad Adnan diangkat menjadi Ketua Mahkamah Islam Tinggi, yang dulu disebut *Voorzitter van de Hof voor Islamitische Zaken* dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tanggal 11-8-1941 Nomor 6, terhitung mulai 1-8-1941, *Griffier* (Panitera) yang pernah mendampingi Mohammad Adnan selama ia menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi yakni: Mr. Mulyatno (mantan Menteri Kehakiman), Mr. Notosusanto (ayah Mendikbud Prof. Nugroho Notosusanto), Mr. Sunaryo (mantan Menteri Dalam Negeri), H. Junaidi (ayah Mahbub Junaidi).

Meskipun sudah terjun dalam profesi kehakiman, tugas penyampaian ilmu Islam dan dakwah Islamiyah dalam bentuk-bentuk pengajian tidak berhenti. Ketika masih tinggal di Surakarta, misalnya, Mohammad Adnan sering mengisi pengajian "Purnama Sidi" yang diadakan oleh Takmir Masjid Agung, pengajian Masjid Tegalsari, pengajian *Rabithatul Muslimat* dan memenuhi undangan berbagai kelompok pengajian.

Selain itu, dalam hubungannya dengan profesi kepenguluhan/kehakiman, Adnan juga, memberikan kursus tentang kepenguluhan/kehakiman yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku kepada para pegawai jabatan keagamaan (naib, penghulu dan sebagai-nya). Kursus itu secara rutin tiap bulan diberikan di *pendhapa pengulon*, dengan pesertanya 30-40 orang.

Perlu diketahui bahwa istilah *pengulu* (Jawa) atau penghulu (Indonesia) mempunyai arti umum: 'yang menjadi kepala' (hulu = kepala). Dalam arti khusus, sebagai istilah di Jawa mempunyai makna *qadli*, atau hakim agama. Di Sumatra, khususnya Sumatra Barat "Penghulu" berarti "kepala adat".

Catatan ceramahnya yang diucapkan dalam berbagai kesempatan itu ia tulis dengan tangannya sendiri dengan jelas dan tepat dalam tiga bahasa: Arab, Indonesia, dan Jawa. Sebagian bisa dikumpulkan dalam tulisan cetak berjudul *Mutiara Hikmah* terbit pada tahun 1980 dan dicetak oleh PT Al-Ma'arif, Bandung.

C. Gerak Amaliah Pada Zaman Pendudukan Jepang

1. Awal Suasana Baru

Untuk mengarahkan dan menampung gerak kaum nasionalis, Jepang menyediakan beberapa wadah organisasi baru, yakni *Jawa Hooke Kai* (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), dan untuk wanita *Fujinkai* (Perhimpunan Wanita) serta beberapa organisasi lain yang sejenis. Semua organisasi itu di bawah pengawasan Pemerintahan Militer Jepang dan diarahkan untuk membantu Jepang dalam usaha memenangkan perangnya melawan Sekutu. Sementara itu para pemimpin Indonesia menggunakannya untuk menggembelng rakyat Indonesia untuk sadar berbangsa dan bertanah air Indonesia, serta untuk menyiapkan diri mencapai kemerdekaan Indonesia.

Organisasi federasi yang mempersatukan perhimpunan-perhimpunan agama dan partai-partai Islam, yakni Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), masih dibolehkan berdiri. Di dalamnya terdapat persyarikatan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Partai Islam Indonesia (PII), diwakili para pemimpinnya W. Wondoamiseno (Ketua Majelis), Harsono Cokroaminoto, dr. Sukiman Wiryoanjoyo, Mohammad Adnan sebagai mantan Ketua PPDP yang sudah bubar masih sering dimintai saran-sarannya.

Gerak MIAI tidak bebas, fungsinya hampir sama dengan Majelis Ulama sekarang. Hal yang dapat dilakukan terbatas pada beberapa kegiatan, misalnya tablig-tablig memperingati hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Quran, Idul Fitri, Iduladha dan sebagainya sambil mengobarkan semangat jihad, kesadaran beragama dan kesadaran berbangsa. Dalam suasana ter-cengkeram oleh kekuasaan Jepang yang ketat itu, sering tidak bisa dihindari memuji-muji kehebatan Jepang.

MIAI sebagai wadah pemersatu para pemimpin Islam dan perhimpunan yang masih ada, tidak lama hidupnya. Majelis ini kemudian berganti dengan wajah baru dengan nama "*Majlis Syuro Muslimin Indonesia* (Masyumi). Majelis yang didirikan pada zaman Jepang ini bukan partai politik, melainkan wadah umat Islam untuk bermusyawarah dalam usaha menentukan langkah dan kegiatan amal baktinya. Usaha yang pernah dilakukan ialah pertama, usul pembentukan *Barisan Hizbullah*, yaitu pasukan suka rela untuk membela tanah air, bangsa dan agama. Yang kedua, usaha mendirikan sekolah Tinggi Islam (STI) yang sudah lama diidam-idamkan umat Islam. *Hizbullah* kemudian diizinkan berdiri, dan STI pun menjadi kenyataan, bahkan dapat dikatakan menjadi embrio Universitas Islam Indonesia (UII) yang kini berpusat di Yogyakarta.

Sementara itu, Jepang dalam usahanya mendekati umat Islam memberikan latihan kepemimpinan kepada para pemuka Islam, kiai atau ulama tingkat "menengah", dari beberapa daerah di pulau Jawa dan Madura. Apa yang diberikan dalam pelatihan itu terutama ialah indoktrinasi tujuan Jepang dalam "Perang Asia Timur Raya", doktrin *Hakko Ichiu* 'Sedunia Sekeluarga', semangat *Bushido*, yang bersifat propaganda, dan sejarah Indonesia. Disamping itu, diadakan *taiso* (senam) yang harus dilakukan setiap pagi dan juga diberikan latihan baris-berbaris. Sudah barang tentu diberikan juga Pengetahuan Agama Islam untuk usaha peningkatan pengetahuan keagamaan masyarakat. Mohammad Adnan pernah

memberikan ceramah tentang agama Islam dalam pelatihan kepemimpinan itu.

Kantor Mahkamah Islam Tinggi, yang diberi nama Jepang *Kaikyo Koto Hooiin*, setelah dibuka kembali melanjutkan tugas rutinnya, yakni menerima apel dari orang yang tidak puas menerima keputusan Pengadilan Agama dalam perkara Nikah, Talak, Rujuk (NTR), dan bersidang untuk mengambil suatu keputusan apakah akan menguatkan keputusan pengadilan Agama dalam tingkat pertama atau membuat keputusan yang lain.

Pembesar-pembesar Jepang jika memerlukan informasi tentang masalah keislaman sering menghubungi Ketua Mahkamah Islam Tinggi, Mohammad Adnan.

2. Usul Pembentukan Departemen Urusan Agama

Untuk menyelidiki dan menyelami adat-istiadat, kebudayaan dan agama bangsa Indonesia, Jepang telah mengirimkan tenaga ahlinya, antara lain *Simizu* dan *Haji Abdul Muniam Inada* (orang Jepang yang beragama Islam). Atas nama balatentara Dai Nippon H. Abdul Muniam Inada berkirim surat kepada Mohammad Adnan pada tanggal 2602 (1942 M), yang ketika itu menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi dan yang kemudian juga diangkat menjadi anggota Jakarta *Tokubetsu Si Sangi Kai* (Dewan Rakyat Daerah Khusus Jakarta).

Isi surat itu berupa pertanyaan untuk dijawab oleh Mohammad Adnan. Pertanyaan itu antara lain sebagai berikut:

"Bagaimanakah cita-cita dan buah pikiran Tuan Kiai tentang usaha mencapai tujuan agama Islam di kemudian hari?"

Jawaban Mohammad Adnan sebagai berikut.

"Sebagaimana yang sudah sering saya kemukakan di depan umum, agama Islam bermaksud memperbaiki hidup dan kehidupan manusia lahir batin. Untuk itu perlu ada usaha peningkatan kehidupan, peningkatan kesehatan ruhani dan jasmani. Disamping itu

perlu tegaknya pengadilan yang menuntun kepada keamanan, pendidikan dan pengajaran yang meningkatkan kecerdasan manusia. akan tetapi usaha yang luas barangkali belum dapat dilakukan Pemerintah karena sekarang masih dalam keadaan perang, dan pemerintah masih sibuk. Apa saja yang kemukakan ini mengingat Undang-Undang Balatentara Dai Nippon No. 1 Tahun 2602 (7-3-1942 M), dan dengan mengingat juga pidato Tuan Gunseikan baru-baru ini."

"Saya mengusulkan agar Pemerintah membentuk suatu departemen yang khusus mengurus dan memperhatikan urusan keislaman. Departemen itu hendaknya dapat memberikan penerangan tentang Islam dan memberikan bimbingan kepada rakyat muslimin guna kemaslahatan bersama dalam zaman baru ini. Jabatan pemimpin Urusan Islam itu hendaknya dipercayakan di tangan muslim Indonesia sendiri, yang cakap, alim keislamannya, setia menjalankan tugasnya, dan bukan asal muslim Indonesia saja."

"Departemen Urusan Islam sepatutnya berkewajiban memperhatikan dan menyelidiki berbagai macam permohonan atau masalah yang dikemukakan para kiai, ulama tanggal 9 Desember 2602 (1942 M). Agama lain, supaya hak mengadili perkara waris kaum muslimin selekasnya dikembalikan dari kekuasaan *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri) kepada kekuasaan *Sooryo Hooiin* (Pengadilan Agama). Departemen itu selayaknya memberikan saran tentang masalah sejenis kepada Pemerintah Dai Nippon."

"Dengan adanya Departemen Urusan Agama Islam diharapkan bahwa sebagian urusan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan Islam dan kaum muslimin terurus dengan seksama. Departemen Urusan Islam mengurus Kepenghuluan, Kemasjidan dan Pegawainya dan Keagamaan untuk perbaikan para pejabat keagamaan itu *Perhimpunan Penghulu* dan *Pegawainya* (PPDP) dulu sudah punya pedomannya dan sudah diterbitkan sebagai buku".

3. Ikut Membentuk Pasukan Perjuangan

Pada zaman Jepang Mohammad Adnan diangkat menjadi anggota Jakarta *Tokubetsu Si Sangi Kai* (Dewan Kota) bersama-sama dengan A. Muhsin Dasaad, Direktur Perusahaan Dagang "Kancil Mas", dr. Slamet Sudibyo, dokter swasta, Ir. Safwan, Pegawai Denki Kosya, *Thee Jin Seng*, Saudagar keturunan Tionghoa, R.H.O. Junaidi, Pemimpin Harian Umum "Pembangun". Mereka dilantik pada 4 Oktober 2603 (1943) (Harian Asia Raya, 17-9-2603 (1943 M)). Jepang mengharap keenam orang itu mencerminkan wakil masyarakat Indonesia, termasuk keturunan Cina.

Pada tahun 1944 Tuan K. Adachi, Kepala Jawa *Gunseikanbu Shihoobu Cho* (Kepala Departemen Urusan Kehakiman Pemerintah Militer Jepang) mengadakan temu muka dengan Ketua Mahkamah Islam Tinggi dan para anggotanya untuk membicarakan urusan kedinasan. Dalam kesempatan itu Adnan mengusulkan agar lingkup kerja Pengadilan Agama tidak dibatasi menurut Peraturan Pengadilan Agama Islam di Tanah Jawa dan Madura yang pernah berlaku di zaman Hindia Belanda. Artinya, Pengadilan Agama hendaknya jangan hanya mengadili perkara Nikah, Talak, Ruju' (NTR), melainkan juga mencakup perkara waris. Dalam hal ini Tuan K. Adachi belum dapat memberikan jawabannya secara tegas.

Dengan landasan keinginan untuk membela tanah air dari serangan Belanda dan sekutunya yang ingin kembali menguasai Indonesia, pemimpin nasionalis Gatot Mangkupraja yang didukung oleh tokoh "*Empat Serangkai*", Ir. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, Kiai H. Mas Mansur, mengusulkan kepada Pemerintah Militer Jepang agar diperkenankan membentuk *Barisan Sukarela* untuk membela tanah air yang terdiri dari bangsa Indonesia. Tidak lama kemudian, sepuluh orang ulama, di antaranya Mohammad Adnan, mengajukan permohonan yang hampir sama kepada pengusaha Jepang, yakni agar diizinkan membentuk *Barisan Penjaga Tanah Jawa yang diatur menurut Peraturan*

Islam. Berita tentang ini dimuat dalam *Almanak Asia Raya*, 2604 (1944 M), hlm. 105 sebagai berikut.

Para alim ulama terkemuka tidak mau ketinggalan. Sepuluh orang ulama terkemuka: (1) Kiai H. Mas Mansur; (2) Kiai R. H. Mohammad Adnan; (3) Dr. H.A. Karim Amrullah; (4) Guru H. Mansur; (5) Guru H. Kholid; (6) Kiai H. Abdul Majid; (7) Guru H. Ya'kub; (8) Kiai H. Junaidi; (9) H. Mukhtar; (10) H. Mohammad Sodri, sebagai wakil umat Islam pada tanggal 13 September 1943 (1943 M) datang di *Gunseikanbu* (Kantor Pemerintah Militer Jepang, pen.) untuk menyampaikan surat kepada *Seiko Sikikan* (Panglima Tentara Jepang). Surat itu antaranya berisi permohonan untuk mendirikan Barisan Penjaga Pulau Jawa yang diatur menurut Peraturan Islam.

Permohonan para pemimpin Islam dan Nasionalis Indonesia itu akhirnya dikabulkan Pemerintah Militer Jepang dengan dikeluarkannya *Osamu Seirei* nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943 (1943 M) mengenai Pembentukan Pasukan Sukarela untuk membela Jawa (Nugroho Notosusanto, 1979:73).

Pasukan Sukarela pertama ini kemudian dikenal dengan nama "*Tentara Pembela Tanah Air*" (Peta). Tentara Peta disusun atas *daidan-daidan* (batalyon) yang tersebar di tiap-tiap *Syu* (Karesidenan), dilatih dan diawasi oleh Tentara Jepang. Dalam tentara Peta itu banyak terdapat pemimpin Islam yang menjabat Dan Yon (*daidanchō*), dan/atau jabatan komandan di bawahnya. Diantara mereka itu misalnya Mr. Kasman Singodimejo, K.H. Ahmad Khotib (Banten). Mulyadi Joyomartono (Surakarta) dan Sudirman (Purwokerto).

Pasukan sukarela kedua kemudian dikenal dengan nama "*Hizbullah*", yang terdiri dari para pemuda Islam. Pasukan itu tidak langsung dibentuk di tiap-tiap daerah (*Syu*). Dari daerah-daerah dikirimkan wakil-wakil pemuda untuk diberikan latihan kemiliteran. Mereka dikumpulkan dalam suatu kamp latihan di luar kota Jakarta, yakni di Cibarusa (Jawa Barat). Selesai mengikuti latihan

kemiliteran mereka dikembalikan ke daerah-daerah untuk merekrut sukarena baru.

Pada akhir masa penduduk Jepang, 1 April 1945, Mohammad Adnan diangkat menjadi Kepala Kantor *Syumubu Dai Ni Kaityō*. *Syumubu* adalah Departemen Urusan Agama, seperti yang pernah diusulkan pada awal kekuasaan Jepang. Di dalam *Syumubu* itu terdapat pula tokoh-tokoh Islam yang lain seperti Kiai Hasyim Asy'ari (yang kemudian mengundurkan diri) dan Kiai Abdul Kahar Muzakkir. Meskipun menjabat Kepala *Syumubu*, jabatan Ketua Mahkamah Islam Tinggi tidak ditinggalkannya, melainkan dirangkap karena belum ada gantinya. Kedua jabatan itu tetap dipegangnya sampai ketika Pemerintah Republik Indonesia memindahkan ibu kotanya ke Yogyakarta dan kemudian terbentuk Kementerian (Departemen) Agama.

D. Derap Langkah Pada Masa Revolusi 1945

1. Melanjutkan Tugas Lama dan Mengemban Tugas Baru

Sesudah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mohammad Adnan sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi terus menjalankan tugas-tugas dinasnya bersama-sama dengan para anggota dan pegawai-pegawainya. Kantor boleh dikatakan berjalan seperti biasa. Akan tetapi pada beberapa bulan kemudian gangguan keamanan makin menjadi-jadi, dan keadaan kota Jakarta menjadi semakin gawat. Para pendukung Republik, baik para pejabat pemerintah, maupun rakyat biasa selalu mengalami gangguan di jalan-jalan. Mereka dicegat oleh aparat NICA (*Netherlands Indies Civil Administration*) dan agen-agennya dengan cara digeledah, diinterogasi dan banyak pula yang ditahan serta mengalami siksaan-siksaan. Aparat keamanan Republik memang ada, yakni Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang baru dibentuk dan Kepolisian Negara. Tetapi keduanya boleh dikatakan belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya

karena persenjataannya yang terbatas, sementara itu Pemerintah RI bersikap amat berhati-hati terhadap Sekutu. Tentara Inggris yang didatangkan ke Jakarta sebagai tentara Sekutu yang akan melucuti tentara Jepang dan mengurus bekas tawanan perang bertindak berat sebelah, dan membiarkan Belanda dengan NICA-nya terlindung di belakangnya. Teror yang terjadi hampir setiap hari di jalan-jalan telah menyebabkan banyak pegawai negeri tidak dapat masuk kantor. Pekerjaan rutin di kantor-kantor akhirnya tidak lancar, termasuk Mahkamah Islam Tinggi.

Ketika situasi keamanan kota Jakarta dinilai amat rawan Pemerintah Republik Indonesia memutuskan memindahkan pusat pemerintahan dan ibu kotanya ke kota Yogyakarta. Jawatan-jawatan dan kantor-kantor di tingkat pusat yang penting-penting pun ikut dihijrahkan ke Yogyakarta dan Jawa Tengah. Mahkamah Islam Tinggi, sebagai salah satu instansi pemerintahan pada awal tahun 1946 dihijrahkan ke kota Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi yang dipindahkan ke Surakarta itu kemudian menempati gedungnya yang baru di Alun-Alun Utara. Gedung itu bekas Bale Agung, yaitu tempat Dewan Kasunanan dulu mengadakan sidang-sidangnya. Menurut Mohammad Adnan, dia kembali ke rumah bekas rumah orang tuanya, Kauman Pengulon, yang jarak tempuhnya hanya memerlukan waktu 10 menit untuk berjalan kaki ke kantornya. Kira-kira 50% pegawai MIT ini ikut berhijrah ke Surakarta. Di antara mereka adalah Muh. Junaidi, Wakil Panitera, Mr. R. Soenarjo, Panitera, K.H. Zarkasyi, Anggota, K.H. Kholil, Anggota. Kepindahan MIT ke Surakarta ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dengan suratnya Nomor 2 Tanggal 2-1-1946 yang ditandatangani oleh Mr. Suwandi untuk waktu yang tidak terbatas. Sejak kepindahan MIT ke Surakarta komunikasi dengan Pengadilan Agama di kota-kota lain dibangun kembali, sehingga berjalan normal.

Sesudah Aksi Militer Belanda ke-I (1947) jumlah Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tinggal 80 ditambah sebuah cabang Pengadilan Agama Surabaya yang berkedudukan di Bawean.

Sesudah Perjanjian Renville ditandatangani, tinggal 41 Pengadilan Agama yang mengadakan hubungan langsung dengan MIT di Surakarta. Di daerah yang sudah dikuasai Belanda, Pemerintah "Federal" buatan Belanda mendirikan Pengadilan Agama sendiri, bahkan juga mendirikan Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surabaya.

Setelah Kementrian Agama berdiri dan berkedudukan di Yogyakarta, Mahkamah Islam Tinggi dimasukkan dalam lingkungan Kementrian Agama.

Dalam prasarannya di depan Sidang Konferensi Dinas Jawatan Agama se-Jawa dan Madura di Yogyakarta, 15-11-1947 yang membicarakan reorganisasi pengadilan Agama, Mohammad Adnan mengemukakan pendapatannya tentang kelemahan Pengadilan Agama, antara lain:

- a. Pada zaman Belanda ada orang-orang yang tidak mempunyai kecakapan di bidang pengadilan dan ilmu agama, serta tidak teguh agamanya diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Penghulu/Hakim Agama Islam. Pengangkatan itu dasarnya hanya karena orang itu masih keluarga Bupati.
- b. Ada orang mau menjadi Penghulu/Hakim Agama, meskipun ia kurang ilmunya, terutama hanya karena dorongan ingin memperoleh penghasilan yang baik.
- c. Ada Hakim Agama yang cakap, tetapi penakut untuk menjalankan kebenaran.

Ada tiga jenis hakim (*qadli*). Satu jenis (golongan) hakim akan masuk surga, dan dua jenis (golongan) hakim yang lain akan masuk neraka, mereka itu adalah:

- a. Hakim yang berilmu, tahu akan kebenaran dan menghukum (mengadili) seseorang dengan tepat atas dasar kebenaran. Mereka itulah ahli surga.

- b. Hakim yang menghukum (mengadili) seseorang dengan kebo-dohan. Mereka akan masuk neraka.
- c. Hakim yang tahu akan kebenaran, tetapi mengadili seseorang dengan zalim (menyimpang dari hukum yang adil). Hakim jenis ini juga akan masuk neraka.

Berhubung dengan adanya kekurangan yang terdapat pada se-jumlah penghulu dan untuk memperbaiki Pengadilan Agama, Mohammad Adnan mengusulkan agar untuk jabaan Penghu-lu/Hakim Agama hendaknya diangkat orang yang khusus mela-kukan pekerjaan sebagai *Qadli Syar'i* yang ahli dalam bidangnya, disertai staf ahli dan pegawai yang khusus pula.

Untuk meningkatkan peran Hukum Islam yang dapat disum-bangkan untuk pembinaan Hukum Nasional, pada tahun 1948 Kementerian Agama telah membentuk Panitia Penyelidik Hukum Islam yang diketuai oleh Prof. Mr. Dr. Soepomo. Di samping itu Mohammad Adnan diangkat sebagai wakil ketuanya (SK Menteri Agama No. 2, Tanggal 21 Januari 1948), Mr. Yusuf Wibisono, Wakil Ketua II, Mr. Soenarjo, Sekretaris, sedangkan anggota-anggotanya terdiri dari: Mr. Kusumaatmaja (Jaksa Agung), Mr. M.M. Joyodiguno, K.H. Abdul Wahab, Ki Bagus Hadikusumo, dr. Abu Hanifah dan K.H. Dahlan.

Dalam rangka menyiapkan kader hakim agama yang cakap, teguh beragama dan bertakwa dan menyediakan guru-guru agama Islam bagi sekolah-sekolah negeri, pada bulan Maret tahun 1948 Kementerian Agama mendirikan suatu lembaga pendidikan, yakni Sekolah Guru dan Hakim Islam. Tugas mendirikan Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) di Surakarta dipercayakan kepada Mohammad Adnan. SGHI adalah sekolah tingkat SMTA yang mendidik calon guru agama dan calon hakim Islam. Untuk semen-tara, sekolah ini dikepalai oleh pendirinya, yakni Mohammad Adnan. Tugas ini untuk zaman revolusi tidak mudah. Sekolah harus mencari tenaga guru dalam bidang studi umum (ilmu pengetahuan sosial dan ilmu eksakta) dan guru untuk bidang studi

keagamaan (ilmu fiqih, akhlak, kalam dan lain-lainnya). Akhirnya SGHI berdiri dengan bantuan guru-guru negeri dan guru madrasah swasta dan pesantren.

Calon-calon siswa yang diterima ialah mereka yang berijazah SMTP Negeri dan/atau Madrasah Tsanawiyah. Kesulitan gedung dapat diatasi karena Yayasan Mustati bersedia meminjami gedung yang pada saat itu tidak terpakai. Gedung itu sekaligus dipakai untuk tempat belajar dan asrama. Jumlah siswanya lebih kurang 100 orang dengan latar belakang pendidikan yang agak heterogen sebagian berasal dari madrasah atau pesantren yang pendidikan umumnya terbatas, sebagian yang lain berasal dari SMTP yang pengetahuan agamanya kurang. Sekolah itu berjalan baik sampai pada waktu Belanda melancarkan Aksi Militernya yang kedua pada tanggal 21 Desember 1948 dan menduduki kota Surakarta. Pada waktu itu gedung sekolah dan asramanya dibumihanguskan, siswanya sebagian pulang kampung, sebagian lagi ikut bergerilya di daerah Surakarta. Sekolah tutup sejak 22 Desember 1948 dan dibuka lagi sesudah pemulihan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada akhir tahun 1949, namun tempatnya dipindahkan ke Yogyakarta. Sesudah berkedudukan di Yogyakarta, SGHI berganti nama menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA). SGHA mempunyai Bagian A (Bahasa), Bagian B (Ilmu Pasti) Bagian C (Sosial/Ekonomi), Bagian D (Hakim Agama). Kuriku-lumnya lebih menyerupai SMA daripada SGA (Sekolah Guru A).

Dalam perkembangannya kemudian, Kementerian Agama mendirikan Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk mendidik calon Guru Agama Islam Sekolah Dasar dan SMP, Pendidikan Guru Agama Pertama (PGAP) yang akan menyediakan calon Guru Muda Agama tingkat SD, dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) yang menyediakan tenaga Hakim Muda untuk Pengadilan Agama. SGHA yang berkedudukan di Yogyakarta ini pertama-tama dipimpin oleh Saketi.

2. Menjadi Anggota DPA

Pada zaman revolusi segala-galanya bisa dan mungkin terjadi. Demikianlah, Mohammad Adnan, seorang ulama yang hanya berpendidikan pesantren tanpa pendidikan Barat dengan tanpa ditanya lebih dahulu diangkat menjadi anggota Lembaga Tinggi Negara, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pemberitahuan pengangkatan itu hanya diketik di atas sehelai kartupos cetakan Jepang, tertanggal 28 September 1945 dan ditandatangani Sekretaris Negara Mr. A.G. Pringgodigdo. Surat keputusan pengangkatan yang sebenarnya baru dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 1946. Pengangkatan itu berdasarkan usul *Masyumi* kepada Presiden Soekarno. Bersama-sama Mohammad Adnan diangkat juga R.A.A. Wiranatakusumah (mantan Bupati Bandung) sebagai Ketua, dan R.M. Margono Djojohadikusumo, Presdir BNI, dr. K.R.T. Rajiman Wedyodiningrat, (mantan Ketua BPUPKI), Syekh Jamil Jambek, ulama dari Bukittinggi, K.R.M.T.H. Woeryaningrat, Bupati Naya-ka Karaton Surakarta, R. Mohamad Enoch, dr. J. Latumeten, Pegawai Tinggi Kementerian Kesehatan, Ir. P. Mohammad Nur, Gubernur Kalimantan, dr. H. Sukiman Wiryoanjoyo, Ketua PB *Masyumi*, Ny. R.A. Soewarni Pringgodigdo, Konggres Wanita Indonesia, Kiai H. Abdul Wahab, ulama dari Jombang.

Pada masa revolusi segala-galanya memang sederhana, bahkan sangat sederhana. Anggota DPA mendapat uang kehormatan 200 rupiah per bulan. Ini berlaku bagi mereka yang tidak merangkap pegawai negeri. Mereka yang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri hanya memperoleh uang duduk (uang sidang) 20 rupiah sehari dan uang harian 15 rupiah. Peraturan honorarium ini berlaku mulai 30 Oktober 1946 (Surat Edaran DPA, 8-3-1946 yang ditandatangani oleh Sekretarisnya, King Natawiyoga).

3. Misi Haji sebagai Misi Diplomati RI

Di tengah kekacauan sebagai akibat oposisi yang dilakukan golongan komunis (PKI) terhadap Pemerintah RI yang dipimpin

Perdana Menteri Hatta, yang pada puncaknya PKI di bawah pimpinan Muso pada 18 September 1948 melakukan pemberontakan di Madiun, Pemerintah RI di bawah pimpinan Perdana Menteri Mohammad Hatta masih harus menghadapi perundingan lanjutan dengan Pemerintah Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB.

Sementara penumpasan terhadap pemberontakan PKI dilakukan terus oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan di pelopori oleh kesatuan-kesatuan dari Divisi Siliwangi dengan bekerja sama dengan segenap kekuatan rakyat yang masih menginginkan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah RI tidak lupa untuk meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

Untuk maksud itu PM/Wapres Moh. Hatta telah meminta bantuan Menteri Agama K.H. Masykur agar beliau mengusahakan terbentuknya "Misi Haji" untuk dikirim ke Makkah dengan tugas ganda yaitu melaksanakan ibadah haji dan sekaligus untuk membina ukhuwah Islamiyah dengan bangsa lain. Tugas itu antara lain menghubungi Pemerintah Arab Saudi untuk minta bantuan atase diplomatik agar negara-negara lain, khususnya negara-negara Timur Tengah, menyatakan pengakuan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan hubungan diplomatiknya.

Pada tanggal 19 September 1948 Kiai H. Masykur pergi ke Surakarta menemui Mohammad Adnan dan Syamsir untuk menyampaikan keputusan sidang Kabinet Hatta dalam usaha mengirimkan Misi Haji Republik Indonesia yang pertama ke tanah suci Makkah pada musim haji 1948.

Pemerintah RI menetapkan susunan Misi Haji Republik Indonesia yang pertama sebagai berikut: 1. Kiai R.H. Mohammad Adnan, Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sebagai Ketua Misi; 2. Saleh Su'aidy, Pegawai Tinggi Kementerian Agama Sebagai Sekretaris; 3. H. Syamsir Sutan Rajo Ameh, Pengusaha Swasta sebagai Bendahara; 4. Ismail Banda, B.A. Pegawai Tinggi Kementerian Luar Negeri yang pernah studi di Mesir sebagai anggota.

Mereka kemudian bersama-sama menghadap Presiden RI, Soekarno di Yogyakarta untuk menerima pesan-pesan. Isi pesan Presiden RI antara lain sebagai berikut :

- a. Misi supaya meninjau keadaan orang-orang Indonesia di Makkah.
- b. Misi supaya memberikan penerangan tentang situasi Indonesia setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya.
- c. Misi supaya menyampaikan ucapan terima kasih Pemerintah dan Rakyat Indonesia kepada Kepala Negara Arab Saudi, Raja Ibn Saud yang telah mengakui kedaulatan Republik Indonesia, dan memberikan pertolongan kepada orang-orang Indonesia di sana.
- d. Misi supaya berdoa ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar bangsa Indonesia mencapai kemenangan dalam perjuangan menegakkan kemerdekaannya.
- e. Misi supaya menjelaskan kepada orang-orang Indonesia di sana dan kepada semua pihak yang berkepentingan, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan sangat menyesal belum bisa memberikan bantuan kepada saudara-saudaranya di Arab Saudi karena masih ada blokade Belanda.

Presiden RI, Soekarno juga menitipkan sebilah keris yang berhulu emas untuk disampaikan kepada Kepala Negara Arab Saudi Raja Ibn Saud, sebagai kenang-kenangan rakyat Indonesia.

Paspor untuk Mohammad Adnan dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia dan ditandatangani oleh *Djuedi*, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri atas nama Presiden RI, tertanggal 27 September 1943.

Rombongan Misi Haji Republik Indonesia yang pertama berangkat dari Bandar Udara Maguwo (sekarang Lanuma Adisucipto, pen.) di Yogyakarta dinihari pukul 02.00 menuju Bangkok dengan pesawat penumpang carteran milik Maskapai Penerbangan *Pasific Overseas Airlines Service*.

Waktu itu (tahun 1948) bepergian dengan pesawat terbang bukanlah hal yang mudah. Republik Indonesia yang daerah kekuasaannya *defactonya* sudah menjadi semakin sempit akibat Aksi Militer Belanda I masih mengalami blokade Belanda. Sebelumnya, pesawat VT-CLA yang membawa obat-obatan dari India untuk RI telah dikejar oleh pesawat pemburu "Mustang" Belanda dan ditembak jatuh di dekat Maguwo. Peristiwa itu telah menyebabkan gugurnya Komodor Udara RI, dr. Abdurrahman Saleh.

Pesawat penumpang *Pasific Overseas Airlines Service* yang dicarter Pemerintah RI itu tentulah harus berhati-hati. Demi keselamatan penerbangan dan agar tidak dicegat pesawat tempur Belanda maka hari dan jam pemberangkatannya dirahasiakan. Akhirnya berkat lindungan Allah rombongan Misi Haji RI selamat tiba di Bangkok, Muang Thai. Dari Bangkok Misi Haji RI harus mencari pesawat lain yang dapat membawanya sampai di Jeddah, Arab Saudi.

Perjalanan dinas Misi Haji Yogyakarta - Jeddah (pulang pergi) biayanya sebagian besar ditanggung oleh seorang pengusaha swasta, H. Syamsir Sutan Rajo Ameh (lahir 1909 di Bukittinggi, Sumatera Barat dan lama tinggal di kota Surakarta). Syamsir membawa bekal perhiasan dari emas milik istrinya untuk dijual dan dipakai untuk biaya perjalanan Misi ini. Istrinya rela memberikannya, karena ia tahu bahwa biaya itu untuk perjuangan.

Hampir semua syarat untuk pergi ke luar negeri dipenuhi oleh Misi, misalnya paspor yang sudah disertai *exit permit* (izin keluar) dari negeri keberangkatan. Visa di Muang Thai juga mudah diperoleh, karena negara itu bersimpati kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia, Hanya satu hal yang terlupa yakni *International Health Certificate*, atau 'Kartu Kesehatan International' yang menerangkan bahwa pemegangnya bebas dari penyakit menular seperti cacar. Namun hal ini dapat diselesaikan berkat jasa seorang dokter berbangsa Vietnam di Bangkok.

Setelah bekalnya lengkap, Misi Haji pergi ke kantor Maskapai Penerbangan KLM. Dengan menunjukkan Sertifikat Kesehatan yang dibuatkan dokter Vietnam itu Misi Haji berhasil membeli tiket pesawat terbang ke Mesir. akan tetapi, petugas KLM mengharuskan mereka membeli tiket Bangkok -- Kairo pulang pergi. KLM khawatir kalau nanti Misi Haji itu tidak bisa kembali dan menjadi beban KLM di sana. Setelah semua syarat yang diminta KLM dipenuhi, berangkatlah Mohammad Adnan dan rombongan dengan pesawat KLM menuju Kairo, sebuah negeri tempat Nabi Musa A.S. dulu berjung melawan Fir'aun.

Menurut catatan Saleh Su'aidi, anggota Misi, Misi Haji tiba di Kairo pada tanggal 6 Oktober 1948 dan rombongan Misi Haji untuk seterusnya berangkat lagi menuju Jeddah, Arab Saudi. Misi Haji bermalam di Hotel Jeddah. Pada tanggal 7 Oktober 1948 Misi berkunjung ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan selanjutnya mereka diterima sebagai tamu negara oleh Pemerintah Arab Saudi. Dari Kementerian Luar Negeri Misi Haji langsung menuju Makkah. Sampai di Umuddud rombongan Misi Haji disambut oleh Haji Rasyidi dan Nyonya dan para pemuda Indonesia yang sudah lama bermukim di sana. Haji Rasyidi sudah lama berdiam di Kairo yang kemudian dia diangkat sebagai Wakil Tetap Indonesia di Mesir dan negara-negara Arab.

Tanggal 10 Oktober 1948 (empat hari lagi wuquf Arafah, puncak ibadah Haji akan dilakukan), Misi Haji dengan diantar oleh wakil RI untuk negara-negara Arab, Haji Rasyidi dan stafnya melakukan kunjungan resmi kepada Kepala Negara Arab Saudi, Raja Ibn Saud di istananya di Makkah. Raja Ibn Saud mempersilakan para tamu Misi Haji yang dipimpin Mohammad Adnan. Raja duduk berdampingan dengannya. Temu wicara dengan Raja Ibn Saud berlangsung lebih kurang 20 menit, dan setelah itu Ketua Misi Haji RI, Mohammad Adnan menyampaikan amanat Presiden RI, menyerahkan sebilah keris yang berhulu emas kepada Raja Ibn Saud. Dengan wajah yang berseri-seri Raja menerima kenang-

kenangan itu, mengamatinya dengan seksama dan mengucapkan terima kasih. Selesai penyerahan tanda mata itu, rombongan Misi Haji RI minta diri dan kembali ke pondokannya. Di pondokannya Misi Haji mendapat kunjungan Wakil Ketua Majelis Asy-suro Arab Saudi yang bernama Saleh Syatam dan Ustadz Sulaiman Sumedeng, seorang ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram dan juga seorang guru bernama Ahmad Dahlan.

Pada tanggal 10 Oktober Misi Haji menerima kunjungan *Syeikh Abdul Jalil Al-Muqoddasi*, pemukim yang berasal dari Surakarta (masih termasuk kerabat Mohammad Adnan), Mutasyar al-Mu'tamat al-Indonesi, juga pemukim di Arab Saudi, serta para Jemaah Haji dari Indonesia, yakni Ahmad Hamid, M. Ya'kub, dan M. Nuri Khunani.

Tanggal 18 Oktober 1948 merupakan saat puncak acara ibadah Haji. Di Arafah diadakan pertemuan dengan orang-orang Indonesia yang berjumlah lebih kurang 500 orang. Di antara mereka terdapat orang-orang yang sedang mengadakan perlawanan terhadap Belanda di Jawa Barat. Pertemuan dipimpin oleh Abdullah Mahder dengan memakai bahasa Sunda *Abdullah Mahder*. Dengan memberikan informasi tentang perjuangan rakyat Indonesia di luar negeri dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Selesai pidato, Abdullah mempersilahkan Mohammad Adnan, Ketua Misi Haji RI, untuk menyampaikan pesan dan amanatnya. Adnan membuka pidatonya dengan salam dan menyampaikan salam dan amanat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dan diakhiri dengan nasihat agama sehubungan dengan kewajiban menjalankan ibadah Haji. Setelah itu, berturut-turut anggota Misi dan Haji Rasyidi diberi kesempatan untuk menyambut. Inti sambutan-sambutan itu antara lain ialah tentang sejarah proklamasi kemerdekaan, situasi tanah air dewasa ini sampai tuntas pengakuan de jure yang pertama dari Mesir terhadap RI, yang kemudian disusul oleh negara-negara Timur Tengah yang lain. Akhirnya pertemuan ditutup pada pukul 15.35 dengan mengucapkan talbiyah

Haji, "*Labbaika Allahumma labbaik*" yang dipimpin oleh Ketua Misi, Mohammad Adnan.

Pada tanggal 15 Oktober 1948 Misi Haji RI mendirikan kemah-kemah di Mina berdampingan dengan kemah-kemah jajaran Korps Diplomatik negara-negara Islam. Misi Haji mendapat undangan dari Raja Ibn Saud di Mina dan pertama kali disambut oleh Kementerian Luar Negeri. Haji Rasyidi sebagai Wakil Tetap RI, dan Mohammad Adnan sebagai Ketua Misi Haji RI dipersilahkan duduk berdampingan dengan Duta Besar Siria, Libanon, Pakistan, dan duta-duta negara Islam yang lain. Satu persatu mereka dipersilahkan bertemu dengan Raja Ibn Saud dengan diantar oleh Menteri Pertahanan Arab Saudi, Amir Mansur. Pembicaraan dengan raja berlangsung selama 15 menit.

Sampai tanggal 21 Oktober 1948 Misi Haji berkunjung ke beberapa tempat dan para tokoh politik, agama serta orang-orang penting lainnya. Diantara kunjungan terpen ting yang patut dicatat ialah kunjungan yang dilakukan oleh Hasan el-Banna, pimpinan *Mursyid al-'am Ikhwanul Muslimin* dari Mesir.

Pada tanggal 23 Oktober 1948 Misi Haji menghadap lagi kepada Raja Ibn Saud untuk mohon diri untuk kembali ke Indonesia.

Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, Misi Haji singgah di Mesir. Di Mesir Misi Haji menemui beberapa orang tokoh pemimpin pemerintahan dan masyarakat. Kepada pemimpin yang dapat ditemuinya itu Misi menyampaikan pesan-pesan Presiden RI. Diantara pemimpin yang ditemui Misi adalah Rektor *Al-Jami'ah Al-Azhar*. Kepada orang-orang Indonesia di Mesir Misi juga menjelaskan situasi tanah air sesudah proklamasi kemerdekaan, dan perjuangan rakyat Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan. Anggota Misi Haji, Ismail Banda, tidak turut melanjutkan perjalanannya pulang ke Indonesia, melainkan terus menetap di Mesir.

Di mesir Haji Syamsir mengajak Mohammad Adnan untuk berjalan-jalan keliling kota Kairo melihat-lihat keadaan. Di samping melihat-lihat keadaan kota Kairo dan berkeliling kota, ada keperluan yang penting, yakni mencari kertas yang baik, berukuran 120 x 60 cm, yang akan digunakan untuk menulis "Quran Pusaka" yang akan dikerjakan oleh putra-putra Indonesia dan yang dibantu oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bung Karno memelopori menulis huruf awal Surat Al-Fatihah, yakni *huruf ba* (ب), sedangkan Bung Hatta menuliskan *huruf mim* (م) untuk ayat pertama.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(*Bismi 'llahir rahmanir rahim*).

Dalam perjalanan pulang, Misi Haji singgah sekali lagi di Bangkok. Di sini Misi Haji bertahan sebulan lamanya. Kesempatan ini digunakan untuk lebih mengetahui keadaan "Negeri Gajah Putih" ini. Mohammad Adnan mengajak para anggota Misi Haji untuk meninjau masyarakat muslim Muang Thai. Tempat yang dikunjungi itu bernama "Kampung Jawa". Dinamakan demikian karena penduduk di situ kebanyakan berasal dari Jawa, dan di antara mereka terdapat bekas *romusya* (pekerja) yang dikirim Jepang dari Jawa ke Muang Thai untuk membuat jalan kereta api untuk kepentingan perangnya. Mereka senang sekali bertemu dengan saudara-saudaranya sesama muslim dan sebangsa dan juga bergembira bahwa Indonesia sudah merdeka. Sesudah Misi memperkenalkan diri dan kemudian saling berkenalan satu sama lain dengan masyarakat muslim Muang Thai itu, ketua Misi Haji, Mohammad Adnan, mendapat kehormatan berkhutbah Jum'ah di Masjid Kampung Jawa itu.

Sambil menunggu pesawat yang akan membawa Misi Haji ke Indonesia, para anggota Misi Haji masih banyak waktu luang untuk melihat-lihat kota Bangkok.

Sebenarnya pesawat yang akan membawa pulang Adnan dan rombongannya adalah pesawat penumpang RI "Seulawah" yang berkode RI 001, yang dibeli rakyat Aceh untuk perjuangan menegakkan kemerdekaan. Setelah lama ditunggu-tunggu pesawat tersebut tidak kunjung tiba, akhirnya lewat bantuan Maskapai Penerbangan Muang Thai, Misi Haji diterbangkan ke Sumatra.

Di Pekan Baru Misi Haji disambut oleh Mr. Abdul Karim, seorang pejabat RI dan atas kebaikan hatinya rombongan Misi Haji RI diantar dengan mobil menuju Bukittinggi, ibu kota Propinsi Sumatra waktu itu. Atas prakarsa Gubernur Sumatra Mr. Teuku Moh. Hatta. Di Bukittinggi mereka menemui Menteri Kemakmuran, Mr. Syafruddin Prawiranegara yang tinggalnya tidak seberapa jauh dari tempat kediaman Misi Haji. Mr. Syafruddin Prawiranegara nanti setelah Agresi Belanda II diberi mandat oleh Presiden RI, Soekarno, untuk menyusun Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra.

Situasi negara RI pada bulan Desember 1948 ternyata makin gawat. Walaupun pemberontakan PKI Muso yang berpusat di Madiun sudah dapat ditumpas oleh TNI (yang dibantu sebagian besar rakyat yang masih tetap mencintai negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945), namun tampaknya perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah RI di bawah pimpinan PM Moh. Hatta dengan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang diadakan di Kaliurang mengalami jalan buntu. Sementara itu, Misi Haji RI yang diutus oleh Pemerintah RI untuk melakukan perjalanan diplomatik ke Timur Tengah masih tertahan di Bukittinggi karena masih menunggu pesawat jemputan yang membawa Misi Haji kembali ke ibu kota RI di Yogyakarta.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Aksi Militernya kedua dengan mengadakan penyerbuan mendadak ke ibu kota RI, Yogyakarta. Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta dan kota-kota lain di seluruh Indonesia, kecuali Aceh.

Sementara itu, TNI bersama-sama kekuatan rakyat menyingkir ke luar kota dan mengadakan perlawanan gerilya.

Setelah Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta, ia menyebarkan pamflet-pamflet di kota-kota lain yang belum dikuasainya yang isinya memberitakan bahwa Republik Indonesia sudah habis riwayatnya dan ibu kotanya, Yogyakarta, sudah diduduki militer Belanda termasuk para pemimpinnya, Soekarno, Hatta, Moh. Rum, Ali Sastroamijoyo, Sutan Syahrir dan kawan-kawannya sudah ditawan Belanda. Berita ini tentu saja tidak membawa patah semangat rakyat di daerah-daerah lain.

Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatra, segera menerima Surat Kuasa (Mandat) untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatra dan segera bergerak untuk melanjutkan perjuangan menegakkan kemerdekaan negara yang telah diproklamasikan.

PDRI kemudian memerintahkan kepada Misi Haji RI agar hijrah ke daerah lain yang aman, atau ikut bergabung dengan PDRI bergerilya di hutan.

Syamsir mengusulkan agar rombongan Misi Haji berhijrah saja ke kampungnya di Guguk, lebih kurang 25 km dari Bukittinggi, sementara Saleh Su'ady ingin pulang ke kampungnya sendiri. Akhirnya diputuskan memilih jalan pikiran Syamsir yang realistis dan Misi Haji tinggal sementara di desa Guguk, Kabupaten Agam. Empat bulan lamanya Mohammad Adnan tinggal di desa Guguk, tinggal bersama keluarga Syamsir. Dalam keluarga itu Mohammad Adnan mendapat perlakuan dan pelayanan yang baik dan penuh hormat.

Dengan izin Pemerintah Penduduk Belanda di Bukittinggi, Mohammad Adnan dan Syamsir pulang ke Surakarta. Pejabat Belanda di Bukittinggi meminta Adnan agar setiba di Jakarta melapor ke *Adviseur voor Inlandse Zaken*. Dari Bukittinggi satu-satunya

kendaraan yang dapat ditumpangi ialah konvoi Belanda. Maka dengan terpaksa Mohammad Adnan naik konvoi Belanda ke Padang. Dari Padang dengan pesawat sipil KLM terbang ke Jakarta. Di Jakarta Mohammad Adnan melapor kepada pejabat *Adviseur voor Inlandse Zaken*, Prof. Dr. Husein Jayadiningrat, seorang Islamolog yang sangat dipercayai Belanda. Dengan cara yang sangat halus Mohammad Adnan ditawarkan Belanda apakah bersedia menjabat kembali sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi dalam Pemerintah Federal Sementara (Pemerintah boneka buatan Belanda). Secara halus dan secara diplomatis dijawabnya bahwa ia (Mohammad Adnan) ingin beristirahat dulu untuk menenangkan pikiran. Akhirnya Mohammad Adnan diizinkan kembali ke Solo bersama-sama Syamsir, lalu kembali ke Solo melalui Semarang.

Suasana kota Solo waktu itu (April -- Juni 1949) masih genting. Jam malam masih berlaku. Tentara Kerajaan Belanda yang terdiri dari KNIL (*Koninklijke Nederlands Indische Leger*) dan KL (*Koninklijke Leger*) terus menghadapi perlawanan gerilyawan RI yang sengit. Hampir setiap malam terdengar bunyi tembakan, baik senapan mesin maupun ledakan granat. Rumah Mohammad Adnan sering disinggahi gerilya dan putra-putranya ikut ambil bagian dalam perlawanan terhadap Belanda. Meskipun para gerilyawan akhirnya menyingkir ke luar kota, ketahuan juga oleh mata-mata Belanda bahwa rumah Mohammad Adnan dijadikan sarang gerilya RI. Terjadilah pembersihan besar-besaran dan pengeledahan yang dilakukan oleh Tentara Belanda dari rumah ke rumah, bahkan terhadap Masjid Agung. Puluhan pemuda ditahan dan diinterogasi. Sementara itu, di rumah mertua Mohammad Adnan juga terjadi pengeledahan. Di sana masih tertinggal baret, sarung pistol dengan satu *magazijn* peluru Vickers. Ini pula yang menyebabkan Mohammad Adnan dan mertuanya ditahan, bahkan mertua Mohammad Adnan terpaksa meringkuk satu malam di tangsi TBS (Territoriaal Batalion Surakarta).

Mohammad Adnan disuruh menghadap pejabat Sipil Belanda di Surakarta (Asisten Residen) dan dibujuk agar mau bekerja dengan Belanda. Mohammad Adnan tetap bertahan sampai akhir masa pendudukan Belanda dan seterusnya tetap menjadi seorang Muslim republikin.

4. Barisan Kiai dan Dewan Pertahanan Ruhani

Para pemuda Muslim yang ingin menyumbangkan darma baktinya, berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan, kebanyakan bergabung ke dalam kesatuan bersenjata yang dikenal dengan nama *Hizbullah* atau *Sabilillah*. Orang-orang tua pun tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi dalam perang kemerdekaan ini. Hanya karena jasmaninya tidak sekuat para pemuda, orang tua terpaksa memilih sarana dan cara yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Atas dasar itu, para kiai dan ulama di daerah Surakarta pada akhir tahun 1945 telah berketetapan hati untuk membentuk wadah perjuangan dengan nama *Barisan Kiai*. Barisan Kiai ini diberi bekal tentang dasar teori kemiliteran dan sedikit ilmu politik untuk memahami perkembangan situasi. *Barisan Kiai* juga melakukan penelaahan agama Islam yang berhubungan dengan perang yang digunakan sebagai landasan berjuang di front terdepan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta nasehat agar mental dan moral mereka yang bertempur melawan Belanda itu tetap terjaga. Tentu saja di antara para kiai itu ada juga yang ikut memanggul senjata bersama-sama para pemuda; karena nasihat-nasihat saja tanpa diikuti bukti tentu kurang bijaksana. Sekurang-kurangnya, para kiai dalam *Barisan Kiai* itu secara bergantian berusaha mengunjungi front pertempuran sambil berdoa dan memberikan dorongan keberanian. Mohammad Adnan juga merupakan salah satu ulama yang tergabung dalam *Barisan Kiai* di Surakarta. Ulama lain yang tergabung dalam *Barisan Kiai* adalah: *Kiai Abdurrahman, Kiai Ma'ruf, Kiai Abdul Karim Tasyrif, Kiai Martoikoro dan Kiai Amir Thohar*. Kiai Abdurrahman gugur di front Srandol Semarang

ketika di sergap musuh dan dimakamkan di Makam Pajang, Solo. Di front belakang Mohammad Adnan telah diminta memberikan ceramah di hadapan anggota *Lasykar Sabilillah*.

Mohammad Adnan tidak hanya memikirkan pembinaan umat Islam ke dalam saja, melainkan dicari upaya untuk bersama-sama umat beragama yang lain turut membela negara. Maka berkumpul para ulama Islam, rohaniawan Katolik dan Protestan dan lain-lainnya. Para pemimpin keagamaan itu bersepakat membentuk wadah perjuangan ruhani pada tanggal 2 Juli 1947, dengan nama *Dewan Perjuangan Ruhani*. Dewan terdiri dari: Kiai R.H. Mohammad Adnan (Ketua), A.J. Siswosubroto (Panitera), A.S. Hadisiswoyo (Panitera) dan beberapa anggota yang lain ialah Rama Pastur Pusposuparmo, Pendeta R. Reksadarmaja, Kiai Imam Ghozali, Pendeta Purwowidagdo, Mayor Duryatman, Muljadi Joyomartono dan Kiai H. Amir Thohar.

Tujuan *Dewan Pertahanan Ruhani* adalah untuk memperhebat pertahanan ruhani (mental) di kalangan ketentaraan dan kelasykaran, baik di garis belakang (asrama-asrama) maupun di garis depan. Demikian pula diusahakan peningkatan kekuatan ruhani/mental di kalangan polisi, pegawai negeri sipil dan rakyat pada umumnya. Untuk maksud tersebut, setiap jemaah harus menyedikan mubaligh, juru penerang dan misionaris untuk dikirim ke berbagai tempat untuk membina jemaahnya masing-masing. Bahan penerangan berupa tuntunan takwa, ketaatan beribadah menurut agamanya masing-masing dan membina semangat cinta kepada agama, tanah air dan bangsa. Ketika golongan pro dan kontra terhadap Persetujuan Linggarjati saling berkonfrontasi, bahkan kadang-kadang dilakukan pengerahan masa dalam rapat raksasa dengan isi pidato-pidato yang pro dan kontra terhadap Persetujuan Linggarjati dengan susunan agitatif dan konfrontatif, dan kadang-kadang bahkan melibatkan kesatuan bersenjata, maka tugas *Dewan Pertahanan Ruhani* dalam hal ini ialah turut serta meredakan ketegangan.

E. Jejak Amaliah Terakhir Dari Era Pemulihan Kedaulatan Sampai Era Orde Baru

1. Ulama dan Politik

Sejak pengangkatan Mohammad Adnan sebagai anggota DPA dengan kartupos tanggal 28 September 1945 dan kemudian penguatan pengangkatan dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 3 Juni 1946 Mohammad Adnan, sebagai salah seorang ulama Indonesia, berarti sudah ikut terjun dalam dunia politik. Jabatannya sebagai anggota DPA berakhir pada tanggal 15 Agustus 1950 ketika Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu anggota DPRS-RI sebanyak 13 orang, Badan Pekerja KNIP 46 orang dan Parlemen RIS 147 orang dialih tugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara RI. Jumlah anggota DPRS-RI berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 adalah 237 orang.

Pengalihan tugas dari DPA ke DPR menyebabkan Mohammad Adnan lebih banyak lagi berkecimpung dalam dunia politik. Karena Mohammad Adnan dulu diusulkan oleh *Masyumi* yang merupakan satu-satunya partai politik Indonesia yang didirikan berdasarkan hasil keputusan Mukhtar Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 November 1945. Di dalamnya tergabung organisasi-organisasi Islam yang berstatus anggota Istimewa. Organisasi-organisasi itu antara lain adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUI), Al-Jam'iyah Al-Washliyah, Al-Irsyad. Partai Masyumi yang semula bersifat federatif namun dalam perkembangannya berubah menjadi unitaris. Ketika pertama didirikan partai itu telah memilih Pengurus Majelis Syuro (Dewan Partai), yang terdiri dari Kiai H. Hasyim Asy'ari (Ketua Umum), Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A. Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, masing-masing sebagai Ketua I, II dan III. Moh. Adnan menjadi anggota.

Sejak Mukhtar Nahdlatul Ulama di Palembang, 1952, NU keluar dari Masyumi sebagai anggota istimewa dan mendirikan partai sendiri, yakni Partai Nahdlatul Ulama. Sebelumnya, yaitu ketika terbentuk Kabinet Amir Syarifuddin, Syarikat Islam sudah berdiri sendiri sebagai partai politik dengan nama PSII. Ketika Mukhtar NU di Palembang diselenggarakan, Adnan yang diundang sebagai Penasehat NU berusaha keras agar NU tidak keluar dari Masyumi, dan dapat menyalurkan aspirasi politiknya melalui *Masyumi*. Perpecahan dalam tubuh *Masyumi* tentu mengecewakan orang yang gandrung persatuan.

Mohammad Adnan sudah berusaha agar NU tetap bertahan, tetapi keputusan Mukhtar lain. NU berdiri sendiri sebagai partai politik. Itu kenyataannya. "Semua kita ambil hikmahnya", kata Mohammad Adnan pada akhirnya.

Untuk menetralisasi suasana, setelah terjadi perpisahan antara NU dan Masyumi 1952, Mohammad Adnan mengundurkan diri dari Fraksi Masyumi, tetapi juga tidak bergabung dengan NU. Untuk sementara Mohammad Adnan tidak berfraksi. Beberapa anggota DPRS yang tidak berfraksi menurut catatan Sekretariat DPRS (1954) yakni: Ehem Erningpraja, Amelz, Assaat, Burhanuddin, Teuku Moh. Hasan, Indra Kusuma, Yusuf Muda Dalam, Rangkyo Rasuna Said, Sirajuddin Abbas, Zainul Baharuddin dan Muh. Yamin. Dalam perkembangan kemudian, sebagian di antara mereka bergabung dengan salah satu fraksi yang ada.

Mohammad Adnan memasuki dunia (partai) politik bukan karena party minded, bukan karena sangat gandrung politik, melainkan karena situasi menghendaki begitu. Dia bukan seorang politikus dan bukan pula negarawan. Profesinya yang pernah diterjuninya adalah dunia pendidikan, terutama pendidikan agama dan selama bertahun-tahun pula menekuni dunia pengadilan, terutama pengadilan agama. Memang, dalam Islam bukan hal yang mustahil ulama terjun dalam dunia politik dan politik bukan selamanya merupakan sesuatu yang "kotor". Pendapatnya tentang

agama dan politik dapat kita baca dalam tulisannya yang berjudul "Siasah dan Ibadah" termuat dalam kitab kumpulan khotbah Jumat yang berjudul Pedoman Mimbar Jumat.

Dalam artikel itu dikemukakan bahwa kesempurnaan perilaku seorang Muslim selain dengan tekun melaksanakan ibadah (*mah-dloh*, seperti sholat dan puasa dan sebagainya) juga perlu memperhatikan kehidupan dunia, yaitu antara lain memperbaiki dunia melalui kegiatan siyasah (politik).

Apakah *siyasah 'adilah* itu ? *Siyasah 'adilah* ialah usaha dan cara mengatur masyarakat, mengatur dan menyelenggarakan negara berdasarkan kejujuran dan keadilan, di atas jalan kebenaran dan menuju perbaikan. *Siyasah zalimah* ialah politik yang hakekatnya berdasarkan aniaya kepada umat, dalam usaha mencapai tujuannya memakai cara tipu muslihat yang berbelit-belit, memutarbalikkan pembicaraan dan kenyataan, dan tidak jujur. Jika orang lengah atau kurang waspada, orang dapat terjerumus ke dalam kesengsaraan akibat siyasah zalimah.

Dalam pergaulannya dengan sesama kawan DPR, Adnan tidak membedakan kawan dan lawan politik. Di luar sidang bisa saja ngomong-omong masalah yang ringan dengan orang PNI, bahkan dengan PKI sekalipun, tetapi di dalam sidang pendirian tetap dipegang teguh, dan solidaritas dengan kawan yang sepaham tetap dijaga. Bahkan waktu masa sidang, ketika harus bermalam di Hotel des Indes, ia sekamar dengan orang yang berbeda fraksi atau partai, misalnya dengan S. Hadikusuma dari PNI. Toleransi dalam pergaulan tetap terjaga. Kadang-kadang Adnan mendapatkan kawan sekamar yang suka lampunya terang waktu tidur, Adnan bisa tidur dengan lampu terang. Kalau kawannya lebih suka tidur dengan memadamkan lampu, Adnan pun tidur dalam keadaan gelap, tidak berkeberatan. Itu contoh tenggang rasa atau toleransi sesama kawan.

Di dalam Pemilihan Umum I tahun 1955, Adnan tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Adnan sebetulnya tidak begitu

berminat lagi dalam kegiatan politik. Namun, di daerah pemilihan Jawa Tengah Masyumi memohon kepada Adnan agar bersedia dicalonkan sebagai anggota Konstituante. Tenaga Mohammad Adnan diperlukan untuk Konstituante karena pengalamannya di bidang kehakiman agama dan pengetahuannya dalam Hukum Islam. Akhirnya Adnan menerima pencalonannya sebagai anggota Konstituante (Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar). Di daerah Pemilu Jawa Tengah Masyumi memperoleh 11 kursi untuk Konstituante. Mereka yang terpilih sebagai anggota Konstituante dari Masyumi yakni: dr. Sukiman Wiryosanjoyo, K.H.R. Moh. Adnan, Hamka, Prawoto Mangkusamito, Mr. Burhanuddin Harahap, Ny. Z. Hafni Abu Hanifah, Abdulhakim dan S. Notosuwiryo.

Pada 1 Januari 1957 Pengurus Besar *Masyumi* memilih kembali Mohammad Adnan sebagai anggota Majelis Syuro Pleno mewakili Yogyakarta dan juga memilih K.H. Imam Ghozali (Surakarta) berdasarkan Keputusan Mukhtamar VIII.

2. Terjun dalam Dunia Pendidikan

Setelah kembali dari menuntut ilmu agama di Makkah, Mohammad Adnan kemudian merintis kegiatan dalam dunia pendidikan. Ia turut membina Madrasah Syari'ah, Tarbiyatul Aitam dan Bowoleksana yang didirikan atas dorongan ayahnya. Ia juga mengajar di Madrasah Khairiyah Pasar Kliwon Surakarta. Kemudian kegiatannya beralih ke pengadilan atau kehakiman atas anjuran orang tuanya juga.

Sejak awal 1939, gagasan mendirikan "Pesantren Luhur" telah dicetuskan Mohammad Adnan dan dr. Satiman Wiryosanjoyo (adik dr. Sukiman Wiryosanjoyo). Gagasan itu bertujuan untuk menampung para santri yang telah lulus Madrasah Aliyah atau Pesantren. Gagasan itu belum terlaksana oleh beberapa sebab :

- a. Dikeluarkannya Ordonansi Guru oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang mewajibkan semua guru yang akan mengajar harus mendapat izin dulu dari Pemerintah Kolonial.
- b. Kegiatan pesantren selalu diawasi oleh Pemerintah Belanda, sebab banyak santri yang menjadi benih penentang yang berani terhadap Belanda, seperti yang terdapat di Nganjuk dan Sidoarjo, Jawa Timur (Buku Tahunan PTAIN 1951 - 1952).

Meskipun usaha mendirikan Pesantren Luhur mula-mula belum berhasil, usaha itu tidak pernah berhenti. Gagasan itu didukung oleh banyak pemimpin Islam yang lain yang pada zaman Jepang berhimpun dalam wadah *Masyumi* (sebelum menjadi partai). Dalam perkembangannya gagasan tentang Pesantren Luhur itu dicetuskan dalam zaman pendudukan Jepang dalam bentuk "Sekolah Tinggi Islam" (STI) yang didirikan di Jakarta. STI sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945 dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Mohammad Adnan pada waktu itu juga memberi kuliah di STI. Di samping itu, ia juga diminta memberi kuliah Hukum Islam di Sekolah Tinggi yang bernama Ken Koku Gakuin. STI sesudah kepindahannya ke Yogyakarta kemudian berganti nama "University Islam Indonesia". Dalam perkembangannya kemudian istilah "university" diubah lagi menjadi universitas. Lalu dinamailah Universitas Islam Indonesia (UII). Pembina UII di Yogyakarta, salah satu diantaranya, ialah Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir, sahabat baik Mohammad Adnan.

Sebelum Mohammad Adnan banyak berkecimpung dalam kehidupan Perguruan Tinggi, sesudah kembali dari Jakarta ke Surakarta 1946, ia diminta memimpin Sekolah Guru dan Hakim Islam di Surakarta pada tahun 1943. Sekolah itu didirikan oleh Kementerian Agama, dan sesudah pemulihan kedaulatan SGHI dipindahkan ke Yogyakarta, berganti nama menjadi Sekolah Guru dan Hakim Agama (SGHA) seperti telah dijelaskan di depan.

Pada 3 Rabiul Akhir 1369 H atau 22 Januari 1950 atas prakarsa Kyai Imam Ghozali dan Mohammad Adnan, yang dibantu oleh

Mr. Tirtohadiningrat dan GPH Joyokusumo di Surakarta didirikan Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTII). Pendiri PTII ini mendapat dukungan dari banyak tokoh Islam, yakni: A. Wahid Hasyim, Faqih Usman, Fathurrahman Kafrawi, A. Hasan (dari Bangil), Mawardi, Imam Zarkasyi, Moh. Dalyono, Munawar Kholil, Moh. Natsir dan dr. Abdul Gafar. PTII pada awal pembukaannya hanya mempunyai Fakultas Hukum dan Ekonomi.

Adanya dua Perguruan Tinggi Islam yang bercorak sama, yakni PTII di Surakarta, dan UII di Yogyakarta memerlukan dana dan tenaga yang cukup banyak. Demi efisiensi dan peningkatan mutu, timbul gagasan untuk menggabungkan kedua perguruan tinggi tersebut. Perundingan untuk menyatukan PTII di Surakarta dan UII di Yogyakarta kemudian diadakan dengan disaksikan Wakil Pemerintah. Mereka diwakili masing-masing oleh Mohammad Adnan dan Tirtohadiningrat (dari pihak PTII) dan Sunaryo dengan Fathurrahman Kafrawi, (dari pihak UII) dan yang mewakili pemerintah yakni Faqih Usman dan Hardi. Akhirnya disepakati penggabungan PTII -- UII menjadi Universitas Islam Indonesia. Mantan PTII di Solo meneruskan kegiatannya sebagai Cabang UII Yogyakarta.

3. Berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

Tanggal 26 September 1951 atau 24 Zulhijjah 1370 H merupakan hari bersejarah bagi dunia pendidikan. Pada hari itu Kementerian Agama mendirikan untuk pertama kali suatu lembaga pendidikan tinggi agama yang diberi nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Peresmian dilakukan oleh Menteri Agama, K.H.A. Wahid Hasyim dan dihadiri oleh para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Kiai H. Fathurrahman Kafrawi selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peresmian Berdirinya PTAIN menyampaikan laporannya yang isinya sebagai berikut :

Bahwa sejak zaman Hindia Belanda hasrat untuk mendirikan Perguruan Islam Tinggi sudah ada, namun penjajah Belanda memusuhinya seperti ternyata dengan adanya Ordonasi Guru. Sementara itu kebanyakan umat Islam sendiri bersikap nonkooperatif, maka hasrat itu belum terlaksana.

Pemerintah Republik Indonesia memerlukan tenaga yang ahli agama untuk jabatan Hakim, Guru, Kepala-Kepala Jawatan Agama, baik di tingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut PTAIN sangat diperlukan. Untuk modal pertama berdirinya PTAIN dilakukan penggabungan Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (bersama para mahasiswa) ke dalam Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta.

Berdirinya PTAIN diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Dalam konsiderans PP itu dinyatakan bahwa Pemerintah RI tidak membedakan agama yang satu dengan yang lain, tetapi yang dirasa sangat mendesak ialah pemenuhan kebutuhan tenaga dalam ilmu keagamaan.

Tujuan PTAIN adalah memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.

Untuk pelaksanaan berdirinya PTAIN, menteri agama membentuk Panitia Persiapan yang terdiri atas Fathurrahman Kafrawi, Abdullah Sigit, A.G. Pringgodigdo, Notosusanto, Abdul Kahar Muzakkir, Farid Ma'ruf, Abdullah Affandi, Sulaiman dan Rusbandi.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diusulkan juga agar usaha mendirikan PTAIN diteruskan oleh Menteri Agama yang baru.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 34/1950 ditentukan bahwa pendirian PTAIN perlu mendapat persetujuan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Berhubung dengan itu Pani-

tia ini perlu disempurnakan lagi dengan mengangkat Faqih Usman yang ketika itu menjabat Kepala Jawatan Pendidikan Agama Yogyakarta sebagai Ketua, dan Notonagoro, Abdullah Sigit, serta Soenarjo sebagai anggotanya. Panitia berhasil menyusun konsep Peraturan Bersama Menteri P dan K dan Menteri Agama. Sebelumnya, Panitia sudah menyusun konsep Peraturan PTAIN yang berhubungan dengan para dosen, senat, Dewan Kurator dan sebagainya. (*Buku Tahunan PTAIN, 1951 - 1952*)

Menteri Agama, A. Wahid Hasyim dalam kata sambutannya mengatakan sebagai berikut :

1. Umat Islam adalah golongan terbesar daripada bangsa Indonesia. Tenaga kehidupan mereka lemah sekali. Maka satu langkah menambah tenaga kehidupan mereka pasti akan disambut dengan gembira oleh setiap putera Indonesia yang demokrat walaupun dia bukan Muslim.
2. Umat Islam dalam keadaannya sekarang ini tidak mungkin dibangun dengan cepat dan tepat untuk membangun negara, kecuali dengan menggerakkan jiwanya yang jitu. Dalam revolusi Indonesia 1945 dengan meneriakkan takbir "Allahu Akbar" dan keyakinan mati syahid, adalah contoh yang tidak dapat dilupakan sejarah. Yaitu, hasil yang didapati bilamana golongan terbesar tadi terkena jiwanya, lalu bangkit kemauannya.
3. Dengan usaha menyempurnakan pendidikan tinggi bagi umat Islam Indonesia sebagai golongan terbesar daripada bangsa Indonesia, dapat tercegah bahaya terbelahnya generasi bangsa kita menjadi dua golongan, "Golongan Mutihan" dan "Golongan Abangan", yang didalam masa penjajahan dulu tidak mungkin merupakan bahaya karena ditekan perkembangannya. Tetapi dalam suasana merdeka ini diberi kesempatan kepada kedua belah pihak tadi untuk berkembang dengan sekuat-kuatnya, lambat atau cepat, dengan cara diplomasi atau kekerasan bisa menjadikan Indonesia ini dua negara. Suatu hal

yang tidak diharapkan setiap putera Indonesia yang terpikir dengan sehat

.....
(*Buku Tahunan PTAIN th. 1951 - 1952*)

Ketika Adnan diminta menduduki jabatan Ketua Fakultas PTAIN usianya sudah mencapai 62 tahun. Ketika itu dia masih menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta dan juga anggota DPA 1945 yang dialihtugaskan.

Oleh Menteri Agama, Mohammad Adnan diangkat menjadi Ketua Fakultas PTAIN atas rekomendasi Panitia dengan alasan semua pihak dari kelompok Islam mendukungnya.

Karena pengganti yang akan menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi belum ada, Mohammad Adnan masih harus merangkap jabatan sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi dan Ketua PTAIN Yogyakarta. Oleh karena itu tugasnya harus dibagi. Kadang-kadang tiga hari ia mengurus pekerjaannya di PTAIN dan tiga hari mengurus pekerjaan lamanya sebagai Ketua MIT di Surakarta. Sesudah Menteri Agama mengangkat Ahmad Zabidi Saobari sebagai Ketua Mahkamah Islam Tinggi yang baru, barulah Mohammad Adnan dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya lebih banyak di PTAIN Yogyakarta. Setelah serah terima jabatan Ketua MIT dari Adnan kepada Ahmad Zabidi dilakukan, pindalah Mohammad Adnan bersama keluarganya ke Yogyakarta dan tinggal di Jalan Widara 18 (sekarang Jalan Suroto) Kotabaru Yogyakarta.

Waktu ia dilantik sebagai Ketua PTAIN oleh Menteri Agama, ia mengucapkan pidato sambutannya sebagai berikut:

"Kami baru saja mendirikan UII di Solo. Jika kami tinggalkan begitu saja, mungkin menjadi teladan yang tidak baik. Itu kekurangan kami yang pertama. Kekurangan saya yang kedua, bahwa umur saya sudah tua, sedangkan masih banyak tenaga yang saya pandang cukup cakap, tetapi karena beliau berhalangan maka terpaksa penyerahan itu harus saya terima dengan sisa kekuatan

yang ada pada saya. Namun, saya bersyukur dan berbesar hati. Banyak kawan lingkungan tugas yang membantu hingga yang kami pikul ini menjadi ringan. Dengan semboyan "Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", saya juga merasa ringan karena kesanggupan pihak Universitas Gajah Mada untuk membantu. Saya merasa ilmu yang saya miliki baru sedikit, tetapi demi kepentingan umum saya ikhlas. Bilamana saya menolak maka lebih bersalah tanggung jawab saya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sebab yang mendorong saya menerima tugas sebagai Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri." (*Buku Tahunan PTAIN, 1951*).

Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh Mohammad Adnan sebagai Ketua PTAIN pada tahap awal, antara lain yakni :

a. Penerimaan Mahasiswa Baru

Sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah disusun (statuta), PTAIN menerima dua macam calon mahasiswa. Pertama, calon mahasiswa yang berijazah SMA atau SLTA kejuruan yang sederhana. Ini merupakan syarat umum penerimaan calon mahasiswa Perguruan Tinggi. Kedua, calon mahasiswa yang berijazah Madrasah Diniyah Tingkat Atas (termasuk Mu'allimin), dan Pesantren yang sederhana.

Dua macam calon mahasiswa dari sumber yang berlatar belakang pendidikan yang berbeda memang menyulitkan. Mahasiswanya menjadi heterogen. Yang pertama, tamatan SMA dengan mudah dapat memenuhi syarat formal tanpa ujian saringan. Sesudah masuk mereka mendapat kesulitan, terutama kalau harus membaca kitab-kitab berbahasa Arab karena bekal mereka sangat terbatas, terutama dalam hal bahasa Arab dan pengetahuan agama Islam. Calon kedua, tamatan Madrasah, mereka mengalami kesulitan ketika mereka menempuh ujian saringan. Bekal mereka dalam ilmu pengetahuan umum kebanyakan terbatas. Tetapi sudah mengikuti kuliah, kebanyakan

mereka tidak mengalami kesulitan menerima kuliah ilmu pengetahuan Agama Islam yang bermacam-macam.

Untuk mengatasi kesulitan itu, PTAIN memberikan dua macam kuliah Bahasa Arab. Bagi tamatan SMA yang merasa bahwa bahasa Arab mereka kurang, atau belum pernah sama sekali, harus mengikuti kuliah Bahasa Arab Elementer yang diberikan oleh H. Farid Ma'ruf, BA. Bagi tamatan Madrasah harus mengikuti kuliah Bahasa Arab Tingkat Lanjutan, yang diberikan oleh K.H.A. Musaddad.

b. Kesulitan Gedung

Pada waktu berdiri, PTAIN belum memiliki gedung. Keadaan seperti ini pada umumnya sama dengan perguruan tinggi lain di Indonesia, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, terutama pada tahun lima puluhan kebanyakan memang keadaannya seperti itu. Universitas Gadjah Mada saja waktu itu masih meminjam gedung Pagelaran, milik Kraton Yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan pendidikannya. Pada awal berdirinya, PTAIN meminjam gedung SGHA Negeri untuk tempat kuliah dan perkantorannya.

c. Hubungan dengan Instansi Atasan

PTAIN mempunyai sangkutan erat dengan dua kementerian. Dalam hal yang berhubungan dengan masalah administrasi kepegawaian, masalah keagamaan dan Ilmu Agama Islam PTAIN mendapat bimbingan dan pengarahan dari Kementerian Agama, sedangkan dalam masalah persyaratan akademik, kegiatan ilmiah dan sebagainya PTAIN terikat oleh peraturan umum perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian PP dan K. Dengan kata lain, dalam melakukan kegiatannya PTAIN selain dibimbing oleh Menteri Agama, juga dalam beberapa hal harus berkonsultasi dan mendapat bimbingan dari Menteri PP dan K. Pekerjaan sering berjalan kurang lancar disebabkan birokrasi yang berbelit-belit sehingga usul-usul PTAIN kepada dua ins-

tansi atasan (Kementerian Agama dan Kementerian PP dan K) biasanya terlambat ditanggapi.

Mohammad Adnan selain mempunyai jabatan struktural sebagai Ketua PTAIN, juga mempunyai jabatan fungsional sebagai dosen (lektor). Mata kuliah yang disampaikan yakni *Ilmu Fiqih*. Disamping itu, ia juga menerima tugas memberi kuliah *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Pada tahun akademik 1953-1954, ada tambahan tugas memberi kuliah Ilmu Tasawuf dan sampai akhir ia mengasuh mata kuliah *Praktek Peradilan Agama*.

Pemimpin PTAIN pada masa itu (tahun lima puluhan) mendapat sebutan yang bermacam-macam. Ada yang menyebutnya "Presiden PTAIN", ada yang menyebut "Ketua Fakultas", kadang-kadang hanya disebut "Ketua PTAIN" jika pemimpin PTAIN dipandang sama dengan sebuah fakultas pada suatu universitas. Bila orang menyebut: "Presiden PTAIN", hakekatnya orang itu men-sejajarkan PTAIN dengan universitas yang membina berbagai disiplin ilmu. Namun demikian, ketua PTAIN tidak pernah disebut Dekan atau Rektor karena kedua istilah itu belum digunakan sebelum adanya Undang-Undang Perguruan Tinggi. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua PTAIN, Mohammad Adnan dibantu oleh seorang Sekretaris. Sekretaris pertama yang mendampingi Mohammad Adnan adalah Mr. R. Soenarjo, yang pernah menjabat Sekjen Kementerian Agama, dan juga pernah menjadi Panitera MIT ketika Adnan menjabat sebagai Ketuanya.

Mereka yang melaksanakan tugas sebagai dosen tetap pada tahap awal berdirinya PTAIN yakni: Mukhtar Yahya (alumnus Universitas Darul 'Ulum Kairo) mengasuh mata kuliah Ilmu Tafsir; Thaib Thohir Abdul Muin (alumnus Universitas Al-Azhar), memberi kuliah Ilmu Kalam; Anwar Musaddad (alumnus Pesantren), memberi kuliah Ilmu Kalam; Hasbi Ash-Shiddieqy (alumnus Pesantren), memberi kuliah Ilmu Hadits; Hertog Joyonegoro (alumnus Universitas Leiden) memberi kuliah Antropologi dan Sejarah Kebudayaan; Soenarjo (alumnus *Recht Hoge School* =

Sekolah Tinggi Hukum) memberi kuliah Asas Hukum Tata Negara.

Lama studi di PTAIN empat tahun atau empat tingkat, dan tiap-tiap tingkat ada namanya, yakni: Propedeuce, Kandidat, Bakaloreat, Doktoral. Pada awal berdirinya PTAIN belum mempunyai fakultas-fakultas, bagian-bagian dan jurusan-jurusan. Istilah "Perguruan Tinggi" sebenarnya mengandung arti yang sangat umum yakni suatu lembaga pendidikan tingkat tinggi. Kalau kita menggunakan istilah menurut Undang-Undang Perguruan Tinggi yang diundangkannya pada tahun enampuluhan PTAIN itu lebih kurang sama dengan Sekolah Tinggi yang membina satu disiplin ilmu, yakni Ilmu Agama Islam.

Calon-calun mahasiswa PTAIN yang berasal dari madrasah atau pesantren, namun belum memenuhi syarat minimal untuk memasuki perguruan tinggi, diharuskan mengikuti studi pendahuluan di Sekolah Persiapan PTAIN. Mereka yang lulus ujian akhir SP PTAIN disamakan dengan lulusan SMA negeri dan kemudian boleh mengikuti kuliah di PTAIN.

Pada tahun pertama pembukaannya PTAIN menerima 100 orang mahasiswa. Pada tahun kedua yang mendaftarkan diri ke PTAIN 77 orang, terdiri dari 21 lulusan madrasah (MMT), 56 lulusan SLTA, yang diterima 36 orang.

Sebagai suatu perguruan tinggi, PTAIN juga dilengkapi dengan senat mahasiswa yakni: Isa Barul (ketua), Kalimah (Sekretaris) dan dibantu oleh para anggota senat: Zaini Dahlan, Ibrahim Husein, Imam Suhadi, Masyfuk Zuhdi dan Hartati.

Para mahasiswa yang masuk PTAIN pada tahun pertama yang mendapat asuhan langsung dari Mohammad Adnan, kebanyakan sudah dapat menyelesaikan studinya di PTAIN. Bahkan banyak diantara mereka yang melakukan studi tambahan di luar negeri dengan rekomendasi PTAIN. Ada yang mendapat gelar tambahan M.A., ada pula yang berhasil memperoleh gelar Doktor. Mereka

itu antara lain yakni: Ismail Johan, Ibrahim Husein, Ahmad Khotib, Abdul Wasit Aulawi, Zakiah Darajat, Isa Barul, Masyfuk Zuhdi, Zaini Dahlan, Mukhtar Naim, A. Hanafi, Anton Timur Jaelani, Razali Amin, Husein Yusuf, Ahmad A. Gani, T.A. Mahmudi. Mereka sudah memenuhi harapan Menteri Agama pada awal PTAIN didirikan, yakni menguasai Ilmu Agama Islam dengan baik dan ilmu pengetahuan umum yang memadai serta menduduki jabatan penting dalam lingkungan Departemen Agama atau departemen lain yang membutuhkan keahliannya.

4. Langkah Maju PTAIN

Sejarah PTAIN maju lagi setapak. Tiga orang dosen tetapnya sudah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan fungsional sebagai guru besar (Profesor) oleh Presiden Republik Indonesia. Mereka itu adalah Kiai Haji Raden Mohammad Adnan, Mukhtar Yahya dan M. Thaib Thahir Abdul Muin. Mereka dilantik menjadi Guru Besar pada Hari Ulang Tahun PTAIN ke-5 pada tanggal 26 September 1956.

Mula-mula Menteri Agama RI melantik Mohammad Adnan sebagai Guru Besar (Profesor) dalam Ilmu Fiqih berdasar Surat Keputusan Presiden RI nomor 269/M tahun 1956. Sesudah itu Mohammad Adnan diberi kuasa oleh Menteri Agama untuk melantik dua rekannya sebagai Guru Besar. Mukhtar Yahya dilantik menjadi Guru Besar dalam Ilmu Tafsir, sedangkan M. Thaib Thahir Abdul Muin dilantik menjadi Guru Besar dalam Ilmu Tasawuf. Sesudah itu Mohammad Adnan mengucapkan Pidato Pengukuhan yang berjudul "*Ilmu Fiqih dan Ushulnya*".

Ketika diangkat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Fiqih, Mohammad Adnan usianya sudah mendekati 63 tahun, dan sering mendapat anugerah sakit. Disamping itu pekerjaan bukan semakin ringan, melainkan bertambah berat. Kemajuan memang ada, akan tetapi masalahnya yang timbul bertambah juga. Mahasiswa yang makin "membengkak" menimbulkan problem tambahan yaitu me-

nyangkut tempat kuliah, transport tenaga dosen yang kadang-kadang harus didatangkan dari luar Yogyakarta.

Sabtu, 9 Februari 1957 terjadi demonstrasi para siswa SP (Sekolah Persiapan) PTAIN. Peristiwa itu menguji ketabahannya. Masa itu berada dalam alam "demokrasi liberal". Perasaan tidak puas dengan mudah dilampiaskan dalam bentuk demonstrasi kepada penguasa atau pejabat. Masalahnya sebetulnya ringan saja dan bisa diselesaikan dengan konsultasi, kalau ada kemauan. Kasusnya, Direktur Sekolah Persiapan PTAIN, T. Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy hendak diganti oleh Pujosubroto, seorang guru tetap pada SGHA/PHIN. Pengganti itu sebenarnya sudah melalui prosedur yang wajar, melalui sidang atau musyawarah Dewan Dosen. Tidak ada motif politik atau kesalahan dalam hal mutasi ini. Maksud penggantian semata-mata untuk lebih memperlancar tugas dan masalah kedinasan. Tidak ada maksud untuk mengucilkannya. Hubungan Adnan dengan Hasbi Ash-Shiddieqy juga sangat akrab.

Esok hari sesudah demonstrasi, Dewan Dosen PTAIN mengadakan sidang. Ketua PTAIN, Mohammad Adnan mengundang para dosen, yakni: Mukhtar Yahya, T. Thohir Abdul Muin, Malian Jam'an, Hertog Joyonegoro, Sulaiman Rasyid, Abdul Quddus dan juga Muh. Kusnin. Mereka diundang untuk membicarakan masalah yang timbul akibat demonstrasi siswa yang menolak penggantian Direktur Sekolah Persiapan PTAIN. Dalam sidang itu diputuskan untuk melaporkan peristiwa itu kepada Kementerian Agama di Jakarta guna mendapatkan penyelesaiannya.

Jumlah mahasiswa PTAIN pada berbagai tingkat pada waktu itu tercatat 750 orang. Jumlah dosennya (tetap dan luar biasa) 30 orang, dan jumlah pegawai tata usaha 30 orang. Ini sebetulnya sudah merupakan kemajuan. Apalagi pada waktu itu PTAIN juga sudah menerima bantuan tenaga pengajar dari Mesir, yakni Prof. Dr. Jabullah Ahmad Shalaby, yang memberi kuliah Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam. Kemajuan itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah-masalah. Demikianlah, penggantian jabatan

seseorang menimbulkan kesalahpahaman di kalangan mahasiswa. Barangkali juga dapat dipikirkan bahwa dengan penggantian itu Tengku Hasbi bahkan akan dapat lebih mencurahkan perhatiannya dalam kegiatan akademik di fakultas. Apa lagi dia yang terkenal sebagai penulis yang produktif dalam buku bidang keagamaan akan sangat diperlukan di fakultasnya.

Berhubung dengan persoalan PTAIN itu makin banyak, dalam keadaan yang sering uzur dan semakin tua Mohammad Adnan untuk kesekian kalinya mengulang lagi permohonannya untuk mengundurkan diri sebagai Ketua PTAIN yang diteruskan kepada Menteri Agama. Surat Mohammad Adnan dibahas dulu oleh staf dosen dalam sidang fakultas. Hasil sidang itu lalu dihapuskan oleh Mukhtar Yahya atas nama Fakultas kepada Mohammad Adnan. Isinya menyatakan bahwa tenaga dan bimbingannya kepada PTAIN masih sangat diperlukan. Berhubung dengan itu, sidang (tanggal 5-3-1957) dengan suara bulat memutuskan, memohon agar Mohammad Adnan tetap bersedia memangku jabatan ketua PTAIN dan sebagai dosen. Tentang batas usia, menurut peraturan dapat dikecualikan apabila yang bersangkutan tenaganya masih diperlukan dan ia masih bersedia menduduki jabatan itu. Fakultas tetap menaruh kepercayaan dan mendukung kepemimpinan Mohammad Adnan.

Adnan menjelaskan bahwa dalam kasus tersebut diperlukan peraturan ditaati dan perkecualian tidak usah digunakan. Ini perlu dinyatakan agar kelak tidak ada umpatan kepadanya bahwa dirinya ingin terus memegang jabatan sekalipun batas usia memberatkan; dengan pengunduran dirinya, akan ada kesempatan bagi yang lain untuk menjadi pemimpin dan ini akan menjadi teladan yang baik.

Setelah Pemilu (Pemilihan Umum) pertama untuk keanggotaan DPR dan konstituante selesai, Kementerian Agama menyatakan beberapa dosen (mereka yang dipilih) dapat menjadi anggota DPR atau konstituante. Setelah PTAIN memberikan keterangan kepada Kementerian Agama tentang nama dosen yang terpilih menjadi

Anggota DPR atau Konstituante, Kementerian Agama lalu memberikan dispensasi kepada dosen-dosen itu bahwa mereka hanya diberi tugas memberi kuliah 4 jam seminggu. Mereka yang terpilih itu ialah T. Moh. Hasbi Ash-Shiddieqy (Konstituante), dan K.H. Anwar Musaddad (DPR). Mohammad Adnan juga terpilih menjadi anggota Konstituante dan ia diberi izin dispensasi hanya mengajar satu mata kuliah saja, yakni Ilmu Fiqih. Dengan mengingat Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1957, perangkapan jabatan Mohammad Adnan dan kawan-kawannya untuk menjabat sebagai anggota Konstituante/DPR di samping menjadi dosen PTAIN dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu. Sampai pada saat ia dipilih menjadi anggota Konstituante, jabatan sebagai Ketua PTAIN belum dilepaskan. Oleh karena itu, sekali lagi untuk ketiga kalinya pada tanggal 23 Agustus 1959 ia mengajukan permohonan berhenti sebagai Ketua PTAIN. Alasannya selain usia lanjut terutama adalah untuk memberi kesempatan kepada tenaga-tenaga muda untuk tampil dan juga mengingat perkembangan PTAIN pada waktu itu. Bila permohonan berhentinya dikabulkan oleh Menteri Agama, ia mengusulkan agar sebagai gantinya diangkat Mr. R.H.A. Soenarjo atau K.H. Fathurrahman Kafrawi, karena keduanya dikenal baik, dan menjadi perintis berdirinya PTAIN. Adnan masih bersedia sebagai dosen biasa memberi Ilmu Fiqih dan Ilmu Tasawuf jika masih diperlukan. Akhirnya permohonan dikabulkan. Mohammad Adnan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua PTAIN. Dalam sidang Fakultas PTAIN, Prof. Mukhtar Yahya terpilih sebagai Ketua PTAIN (pada tanggal 29 Agustus 1959). Adnan diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua PTAIN berdasarkan Surat Keputusan Menteri Muda Agama K.H. Abdul Wahib Wahab 5 November 1959, Nomor C/IV-I/5939. Serah terima jabatan Ketua (Fakultas) PTAIN dari Prof. K.H.R. Mohammad Adnan kepada Prof. Mukhtar Yahya setelah Prof. Mukhtar Yahya menerima Surat Keputusan pengangkatannya pada tanggal 16 Desember 1959.

Ketika menjabat Ketua PTAIN, Mohammad Adnan bukan saja memperhatikan masalah tugas akademik, melainkan juga masalah kebersihan. Pada saat ia melihat beberapa ruang di PTAIN belum bersih dan kamar kecil atau WC-nya bukan main kotornya, ia langsung mengambil alat pembersih. Ia melakukan agar benar-benar melaksanakan tugas membersihkan ruang-ruang, termasuk kamar mandi dan kamar kecil, tetapi perintah itu kurang diperhatikan banyak orang. Dengan mengerjakan sendiri pembersihan yang sebenarnya bukan tugasnya secara langsung ia ingin memberi pendidikan kepada bawahannya bahwa bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan. Inilah salah satu teladan yang diberikan kepada pegawai bawahannya.

5. PTAIN menjadi IAIN

Pada dasawarsa 50-an dan 60-an Kementerian Agama (yang berubah menjadi Departemen Agama), setelah kita kembali ke UUD 1945, mengelola dua Lembaga Pendidikan Agama Islam, yaitu yang berkedudukan di Yogyakarta disebut *Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri*, dan yang berkedudukan di Jakarta disebut *Akademi Dinas Ilmu Agama* (ADIA). Untuk meningkatkan kualitas, kuantitas dan efisiensi kedua Perguruan Tinggi itu maka pada tanggal 2 Rabiul Awal 1380 Hijriyah atau 24 Agustus 1960 diganti dengan satu nama, yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang satu berkedudukan di Yogyakarta dan yang lainnya di Jakarta. IAIN Yogyakarta pada tahun 1960 sudah mempunyai kampus sendiri, yakni di Kampung Demangan, Jalan Solo km. 6, termasuk Kabupaten Sleman. IAIN Jakarta mempunyai kampus di Ciputat, Kebayoran Lama dan yang diangkat sebagai rektor pertama ialah Mr. R.H.A. Soenarjo yang dulu pernah menjadi sekretaris PTAIN.

IAIN diresmikan oleh Menteri Agama berdasarkan Penetapan Presiden No. 11 Tahun 1960 dan mempunyai Fakultas Ushuluddin, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah pada awal berdirinya.

Sebetulnya sejak awal berdirinya, PTAIN sudah berusaha mencari tanah, untuk tempat lokasi kampusnya. Akan tetapi baru setelah 9 tahun Mohammad Adnan memimpin, tanah baru diperoleh di Demangan, km 6 Jalan Solo, berbatasan dengan Gedung Wanita di sebelah baratnya, Jalan Adisucipto sebelah utara, Sungai Gajahwong di sebelah timurnya dan kampung Sapen di selatannya. Luas tanah yang digunakan Kampus IAIN sekitar 5 hektar. Sayang sekali sebagian tanah yang semula direncanakan menjadi bagian dari Kampus IAIN karena kelambatan pengurusannya sudah dipakai lebih dahulu (oleh organisasi wanita) untuk Gedung Wanita.

Pada 16 Juli 1962 Gedung IAIN di Kampus Demangan sudah dapat dipakai untuk kegiatan perkuliahan. Atas usul Mohammad Adnan upacara peresmian Kampus IAIN di Demangan diadakan pada 24 Juli 1962. Diantara acara yang diusulkan dalam peresmian gedung baru beserta kampusnya itu adalah pagelaran wayang kulit dengan lakon "Wedharing Wahyu Pakem Makutha Rama" dengan *dhalang* Muslim yang bernama Haji Musyhadhi Kunawi, dari Nusukan, Sala.

Mohammad Adnan menjelaskan bahwa pertunjukan wayang kulit itu bukan sesuatu yang harus disingkirkan. Wayang hanyalah sekedar alat (media) yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu pesan (message, pen). Sebagai alat, tujuan dan kemanfaatannya bergantung kepada siapa yang menggunakannya, bagaimana cara menggunakannya, dan apa isi (pesan, *message*) yang hendak disampaikan kepada khalayak. Jadi wayang bisa juga digunakan untuk media dakwah. Pada masa abad ke-15 wayang sudah dipakai sebagai media dakwah yang ampuh, sebab sudah merupakan pertunjukan yang populer di kalangan rakyat banyak di Jawa (majalah resmi IAIN *Al-Djami'ah* Juni 1962).

Pengetahuan Adnan yang banyak tentang tradisi masyarakat Jawa dan ceramahnya tentang "wayang dan hubungannya dengan Da'wah Islamiyah" telah menarik salah seorang mahasiswanya

untuk mendalaminya dengan menulis skripsi yang berjudul "Unsur Islam dalam Pewayangan". Mahasiswa tersebut bernama Effendi Zarkasyi. Ia mendapat bimbingan utama dari Prof. K.H.R. Mohammad Adnan dan pembimbing lainnya yakni Prof. Mukhtar Yahya dan Hertog Joyonegoro. Effendi Zarkasyi berhasil menempuh ujian 1962. Drs. H. Effendi Zarkasyi sejak 1972 menduduki jabatan Direktur Penerangan Agama Departemen Agama.

Dengan perkembangannya yang pesat, PTAIN menjelma menjadi IAIN Yogyakarta (dinamakan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan IAIN Jakarta (dinamakan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan selanjutnya berkembang menjadi 14 institut yang terdapat di beberapa kota besar di Indonesia. PTAIN ketika berdirinya semula hanya merupakan satu fakultas agama, sesudah menjadi IAIN sekurang-kurangnya di tiap institut ada tiga jenis fakultas, dan dalam kelanjutan perkembangannya meliputi sejumlah fakultas dengan berbagai jenis disiplin ilmu keagamaan yang dibinanya (tercatat 72 buah pada Dies Natalis ke-9, 19 Mei 1969).

Ketika di IAIN Sunan Kalijaga didirikan Lembaga Sejarah dan Kebudayaan Islam, Mohammad Adnan diangkat pula menjadi Penasehat LSKI. Dia mengusulkan agar IAIN yang telah didirikan di berbagai daerah itu diberi nama dengan nama para pahlawan Islam Indonesia. Kalau universitas negeri di Yogyakarta memakai nama tokoh kerajaan Majapahit "Gajah Mada", maka sebaiknya semua IAIN kita beri nama tokoh-tokoh "Wali Sanga" yakni Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Usul itu rupanya dapat diterima, dan sekarang nama-nama IAIN di seluruh Indonesia itu sebagian memakai nama-nama anggota Wali Sanga, dan sebagian lagi nama tokoh pahlawan Muslimin Indonesia seperti Syarif Hidayatullah (Jakarta), Ar-Raniri (Aceh), Imam Bonjol (Padang), dan sebagainya.

Sejak tahun 1961 suhu politik di Indonesia sudah mulai panas. Kehidupan para mahasiswa di kampus-kampus perguruan tinggi terpengaruh juga oleh naiknya suhu politik itu, termasuk kehi-

dupan di IAIN. Naiknya suhu politik dalam kerangka kepentingan nasional pembebasan Irian Barat umumnya diterima rakyat Indonesia. Akan tetapi bersamaan dengan itu sering menyelip "politik golongan", terutama usaha PKI yang ingin membelokkan haluan politik negara, sangat banyak menimbulkan gejolak.

Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Pimpinan Besar Revolusi, Soekarno --begitulah gelar yang disandang Soekarno pada waktu itu-- mengumumkan Tri Komando Rakyat dalam pidatonya di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Isi Tri Komando itu yakni: 1. Gagalkan pembentukan Negara Boneka Papua, buatan kolonialis Belanda; 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat; 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Untuk persiapan mobilisasi umum itu IAIN Yogyakarta pada 12 Januari 1962 membentuk "Batalion Sukarela" yang beranggotakan 2000 mahasiswa dengan komandannya Drs.H. Muhyiddin Zein, dan Drs. Mawardi A.I. sebagai Kepala Stafnya. Pada tanggal 14 Juli 1962 3 kompi sukarelawan mahasiswa selesai dilatih oleh Instruktur dari Korem 072 Kodam VII Diponegoro. Selain itu mahasiswa mulai dikotak-kotakkan ke dalam golongan politik berdasarkan gagasan Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Rinciannya situasi politik itu sudah dimulai ketika ada pergolakan daerah, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Permesta di Sulawesi dan PRRI di Sumatera. Ketika "Pemimpin Besar Revolusi" mencanangkan konfrontasi dengan Malaysia suhu politik semakin panas. Ini berpengaruh pada kehidupan mahasiswa. Kampus IAIN juga dilanda kemelut politik, meskipun coraknya berbeda.

6. Kemelut Politik 10 Oktober 1963

Usia Mohammad Adnan waktu itu sudah 74 tahun. Dalam keadaan jasmani yang kurang sehat, dia sudah jarang bepergian, dan sering hanya berbaring di tempat tidur. Ia dirawat oleh dokter

Tarnuzi Imran, dokter dan dosen pada Seksi Patologi, Fakultas Kedokteran UGM, yang juga bera-sal dari Surakarta. Menurut dokter tersebut, ia tidak mengidap penyakit yang berbahaya. Hanya karena ketuaannya maka kekuatannya sudah semakin berkurang. Untuk itu dokter memberikan pil vitamin dan semacamnya guna menambah kekuatannya, antara lain pil H3 yang terkenal waktu itu. Ada juga sedikit gangguan yang diderita, yakni bronchitis ringan yang akut. Dokter juga sudah berusaha untuk memberikan pengobatan dan perawatannya.

Meskipun berbaring di tempat tidur Adnan tidak meninggalkan kegemarannya membaca koran dan majalah. Yang sering dibacanya koran *Kedaulatan Rakyat* dan majalah *Minggu Pagi* yang terbit di Yogyakarta. Dari koran dan majalah itulah ia mengikuti perkembangan politik dalam dan luar negeri. Ia juga gemar mengisap rokok kretek, tetapi ketika dokter melarangnya, karena bronchitisnya, ia dapat menghentikan kebiasaannya merokok.

Abdul Nur Adnan, anaknya yang menjadi wakil Pimpinan Redaksi harian *Mercu Suar* di Yogyakarta sering menyampaikan berita hangat yang terjadi di sekitar tanah air sebagai oleh-olehnya. Kalau Adnan sudah lelah membaca, dari anaknya lah datang berita-berita yang disiarkan RRI Jakarta.

Dalam usia tua dan dalam keadaan kekuatan jasmaninya yang (sudah) menurun itulah ia menerima berita yang memprihatinkan tentang "keributan" yang terjadi pada bulan Oktober 1963.

Hari itu tanggal 10 Oktober 1963. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H., mengundangnya untuk menghadiri Rapat Senat Terbuka yang akan dilaksanakan. Diantara acaranya ialah kuliah umum yang berjudul "Tinjauan Tentang Milik Umum Menurut Pandangan Barat, dan Sosialis Islam di Indonesia", oleh Prof. R.H.A. Soenarjo, S.H., Rektor IAIN.

Rapat Senat Terbuka belum sampai dimulai, tiba-tiba tampil sekelompok mahasiswa anggota Dewan Mahasiswa yang dipimpin

oleh Ketuanya, Muh. Syamsuddin Nur, membacakan pernyataan di depan hadirin. Pernyataan disampaikan kepada Ketua Dewan Kurator IAIN, Prof. dr. Sardjito, dan disaksikan oleh para undangan. Sementara itu, sejumlah mahasiswa membawa poster-poster dan memasang plakat-plakat yang isinya senada dengan Dewan Mahasiswa.

Isi pernyataan Dewan Mahasiswa itu antara lain yakni, dikonstatir adanya monopoli kelompok tertentu dalam Pimpinan IAIN yang menimbulkan "mismanagement" (salah urus), birokrasi, otokrasi dan golongan sentris. Disebutlah pula bahwa Pemimpin IAIN telah mengganti 4 sekretaris dari keempat fakultas yang ada di IAIN tanpa alasan yang jelas. Keempat sekretaris itu alumnus IAIN. Kalau keadaan itu dibiarkan maka tujuan dan harapan umat tidak akan tercapai (*Mercu Suar*, 11 Oktober 1963). Pada waktu peristiwa ini terjadi, yang menjadi Menteri Agama ialah K.H. Saifuddin Zuhri.

Mohammad Adnan tidak dapat menyaksikan sendiri peristiwa 10 Oktober 1963 itu, karena ia tidak dapat hadir berhubungan kesehatannya. Ia mengetahui berita itu setelah membaca koran *Mercu Suar* yang terbit keesokan harinya 11 Oktober 1963. Ia sangat menyayangkan terjadinya peristiwa itu, dan sambil membaca beritanya, ia berkali-kali mengucapkan Astagfirullah al-'adzim tanpa memberi komentar siapa yang bersalah dalam peristiwa ini. Ia hanya mengatakan "Sungguh memalukan, nama IAIN terbawa-bawa".

7. Memberi Kuliah Agama Islam di UGM

Setelah berlakunya Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang pelaksanaan Pendidikan Agama di lembaga-lembaga pendidikan, UGM mulai menyiapkan kuliah Pendidikan Agama Islam yang merupakan bagian dari perkuliahan yang disebut "Studium Generale". Untuk itu Universitas Gajah Mada telah meminta Mohammad Adnan untuk memberikan kuliah Agama Islam kepada

para mahasiswa UGM yang berasal dari fakultas. Kuliah itu diselenggarakan dan diatur oleh Fakultas Umum dan Filsafat, dan ini dilakukan untuk pertama kali di UGM. Dalam kuliah itu Mohammad Adnan menitikberatkan kepada pembinaan keimanan dan keislaman para mahasiswa. Rangkuman kuliahnya kemudian dibukukan, diberi judul *Tuntunan Iman dan Islam* dan diterbitkan oleh Penerbit Djajamurni, Jakarta, 1963. Agar ilmu dan amal berjalan seiring, Mohammad Adnan menganjurkan agar di UGM didirikan sholat Jumat sendiri. Untuk pertama kali shalat Jum'at di kampus UGM diselenggarakan di Gedung Unit V (Perpustakaan Pusat UGM) Sekip dengan imam dan khatibnya Mohammad Adnan. Dalam melaksanakan kuliah Agama Islam di UGM Mohammad Adnan dibantu oleh Abdul Mukti Hadipaningrat, rekannya yang dulu sama-sama membina Madrasah Syari'iyah di Kauman Surakarta. Demikian pula pada tahap permulaan, Mohammad Adnan dan Abdul Mukti Hadipaningrat bertindak selaku khatib dan imam secara bergantian.

8. Kegiatan Lain-Lain

Dalam usia 78 tahun Mohammad Adnan belum pensiun. Institut dan fakultasnya masih memerlukan tenaganya dan menghargai jasanya sebagai perintis IAIN. Oleh karena itu beliau masih juga diundang dan diminta pertimbangan-pertimbangannya. Karena kesehatan Mohammad Adnan makin menurun, Dekan Fakultas Syari'ah IAIN, Prof. T. Hasbi Ash-shiddieqy yang selisih usianya tidak jauh berbeda dengan Adnan, mengizinkan Mohammad Adnan memberi kuliah di Jurusan Qadla', yakni Praktek Pengadilan Agama Islam. Mahasiswa yang mengikuti kuliahnya datang di rumah Jalan Suroto 18 Yogyakarta.

Meskipun sudah dalam keadaan uzur, Mohammad Adnan masih suka bersilaturahmi. Kegemarannya tinggal satu, yaitu mengisi dan mendengarkan pengajian di berbagai tempat, baik di Yogyakarta maupun Surakarta.

Pada akhir tahun 1965, Mohammad Adnan sudah jarang ke luar kota, karena kesehatannya semakin berkurang. Sambil berbaring di tempat tidur, ia banyak dikunjungi famili dan sahabat-sahabatnya yang setia untuk menengok dan saling bertukar pikiran. Hal-hal yang demikian itulah yang menghiburnya.

Keadaan politik negara dan bangsa Indonesia semakin memanas karena kegiatan politik PKI, dan konfrontasi dengan negara tetangga Malaysia juga semakin mendekati titik puncaknya. Akhirnya, meletuslah gerakan kudeta yang didalangi PKI yang berhasil ditumpas oleh ABRI bersama rakyat.

Mohammad Adnan mendengar berita hangat itu melalui radio dan surat kabar yang dibacakan anak-anaknya. Kemampuan dalam membaca, walaupun masih berhasrat, terlihat semakin menurun sedangkan pada masa itu belum banyak orang mempunyai pesawat televisi, yang karena itu radio masih merupakan alat penerangan yang penting.

Pada tengah malam dinihari, Selasa Pon 24 Juni 1969, pukul 03.30 Allah yang Maha Pengasih memanggil hamba-Nya, Mohammad Adnan, setelah mencapai usia 80 tahun. Jenazahnya dimakamkan hari itu juga ke Pajang, Sala setelah dishalatkan di masjid Syuhada Yogyakarta dan masjid Tegalsari sebuah masjid hasil karyanya ketika masih muda. Meninggalkan seorang istri, Nyonya Hajjah Salamah, 8 putra-putri dan beberapa cucu. Dengan kepergiannya, IAIN Sunan Kalijaga kehilangan seorang yang pernah merintisnya bersama teman-teman karibnya yang kini telah berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang telah banyak mencetak ulama, zuama dan cendekiawan muslim di persada Nusantara ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Adnan
Kelahiran : 16 Mei 1889, di Kauman, Pengulon, Surakarta
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam

Riwayat Pekerjaan

1. 1919 - 1921 menjabat Anggauta Pengadilan Agama di Surakarta.
2. 1921 - 1922 menjabat Adj. Hoofd Pengulu di Surakarta.
3. 1922 - 1941 menjabat Hoofd Pengulu di Surakarta.
4. 1941 - 1951 menjabat Ketua Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta/Surakarta.
5. 1951 menjabat Ketua Fakultas Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta/ Guru Besar Ilmu Fiqh.
6. Selain itu pernah menjabat :
 - a. Anggauta Jakarta Tokumetsui Sangikai.
 - b. Penasehat Palang Merah Indonesia Pusat.
 - c. Penasehat Barisan Hizbullah/Sabilillah.
 - d. Ketua Misi Haji Pertama Pemerintah R.I.
 - e. Anggauta Dewan Pertimbangan Agung R.I.
 - f. Anggauta Parlemen/Konstituante R.I.

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Mamba'ul 'Ulum, Surakarta.
2. Beberapa Pondok Pesantren di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.
3. Memperdalam Ilmu Agama Islam di Mekkah dan Medinah, Saudi Arabia selama 8 tahun.